

Rencana Strategis Perubahan 2024-2026



Dokumen ini telah diotentikasi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sibabai.jabarprov.go.id/77852C6B0B>

77852C6B0B



KATA PENGANTAR

Dokumen Renstra Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 memuat delapan Bab, antara lain : Pendahuluan, memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan, Gambaran Pelayanan Dispusipda memuat tentang Tugas, Fungsi dan struktur organisasi Dispusipda, Sumber Daya Dispusipda, Kinerja Pelayanan Dispusipda, serta tantangan dan Peluang pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat daerah, memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat, Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan Penentuan Isu-isu Strategis. Tujuan dan Sasaran memuat tentang tujuan dan sasaran Jangka Menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

Strategi dan Arah Kebijakan memuat tentang strategi dan arah kebijakan Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan memuat tentang Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan memuat tentang Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Dispusipda Provinsi Jawa Barat dan terakhir Penutup memuat tentang ringkasan Renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasikan Renstra Perubahan Dispusipda Tahun 2024-2026.

Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan berupa saran maupun pandangan sehingga Renstra Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 dapat tersusun dengan baik.

Bandung, 3 Mei 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda





DAFTAR ISI

| | Hal. |
|--|------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| BAB I : PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 1.2 Dasar Hukum | 2 |
| 1.3 Maksud dan Tujuan | 3 |
| 1.4 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT | 6 |
| 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 6 |
| 2.2 Sumber Daya Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 8 |
| 2.3 Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 13 |
| 2.4 Kelompok Sasaran Layanan | 22 |
| 2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 22 |
| BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT | 24 |
| 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispusipda | 24 |
| 3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga..... | 26 |
| 3.3 Telaahan Keterkaitan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat..... | 27 |
| 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis..... | 28 |
| BAB IV : Tujuan dan Sasaran | 33 |
| 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 33 |
| 4.2. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria NSPK)..... | 36 |
| BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN | 37 |
| BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN | 39 |
| BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN | 48 |
| BAB VIII : PENUTUP | 50 |





DAFTAR TABEL

| | | |
|-------------|--|----|
| Tabel 2.1. | Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023 | 9 |
| Tabel 2.2. | Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023 | 9 |
| Tabel 2.3. | Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023 | 9 |
| Tabel 2.4. | Aset/Modal yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | 9 |
| Tabel 2.5. | Sarana dan Prasarana Urusan Perpustakaan | 10 |
| Tabel 2.6. | Sarana dan Prasarana Urusan Kearsipan | 11 |
| Tabel 2.7. | Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Tahun 2023 | 12 |
| Tabel 2.8. | Volume Arsip Tahun 2023 | 13 |
| Tabel 2.9. | Unit Usaha Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 13 |
| Tabel 2.10. | Pencapaian Kinerja Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 16 |
| Tabel 2.11. | Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat | 24 |
| Tabel 3.1. | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah | 27 |
| Tabel 3.2. | Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Isu Strategis Dispusipda Tahun 2024-2026 | 28 |
| Tabel 4.1. | Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat ... | 34 |
| Tabel 5.1. | Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan | 37 |
| Tabel 5.2. | Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan | 38 |
| Tabel 6.1. | Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dispusipda tahun 2024-2026 | 40 |
| Tabel 7.1. | Indikator Kinerja Utama Dispusipda tahun 2024-2026 | 48 |
| Tabel 7.2. | Indikator Kinerja Program Dispusipda tahun 2024-2026 | 49 |





DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat 8



77852C6B0B



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien sangat tergantung dengan adanya perencanaan yang disusun sebagai penjabaran lebih terperinci tentang apa yang akan dikerjakan kedepan dan menentukan serta menetapkan apa yang akan dicapai melalui suatu proses perencanaan strategis.

Penyusunan perencanaan strategis perangkat daerah telah diatur pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dari Pasal 108 sampai dengan Pasal 123.

Berdasarkan ketentuan diatas, proses perencanaan strategis telah tergambar dengan jelas, terdapat langkah-langkah tahapan yang harus dilalui seperti persiapan penyusunan rencana strategis, penyusunan rancangan awal Renstra, dan penyusunan rancangan akhir rencana strategis.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat kedudukannya sebagai Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat berbentuk Dinas memiliki wewenang untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yaitu urusan perpustakaan dan urusan kearsipan sebagai urusan pemerintahan konkuren dan termasuk urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dengan memperhatikan kedudukan Dispusipda tersebut, problematika perencanaan strategis urusan perpustakaan dan urusan kearsipan dapat dikatakan relatif besar berbanding dengan pelimpahan wewenang urusan perpustakaan dan urusan kearsipan menjadi urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah.

Urgensi Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 telah mempertimbangkan problematika atau persoalan secara komprehensif, dan mempertimbangkan juga harmonisasi dan sinergitas sesuai visi, misi, tujuan dan sasaran, arah kebijakan, strategi, dan program prioritas pembangunan daerah.





1.2 Dasar Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4774);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5286);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
9. Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020–2024;
10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Arsip Nasional Republik Indonesia Tahun 2020–2024;





11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kearsipan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 6; Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 224);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 196 Tahun 2016 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262).
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 39 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kearsipan;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 81 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 17 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat;
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 Nomor 64 Seri D);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026;
23. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 47/PR.01/BAPP tanggal 27 April 2023 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 142/PR.01/BAPP tentang Jadwal Penyusunan Perencanaan Tahunan 2024.





1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024–2026 selanjutnya disebut Renstra Perubahan Dispusipda merupakan dokumen resmi perencanaan Dispusipda Provinsi Jawa Barat untuk 3 (tiga) tahun yang menggambarkan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan serta tahapan program dan kegiatan strategis yang akan dicapai dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat urusan perpustakaan dan kearsipan.

Renstra Perubahan Dispusipda ditetapkan dengan maksud:

- a) Sebagai penjabaran atas RPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat;
- b) Sebagai arah dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Dispusipda Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026;
- c) Sebagai indikator kunci keberhasilan Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renstra Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, adalah :

- a) Sebagai acuan dan/atau pedoman kerja bagi seluruh unsur Dispusipda Provinsi Jawa Barat sesuai dengan tugas dan fungsinya, termasuk untuk mengelola pencapaian sasaran RPD;
- b) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispusipda Provinsi Jawa Barat setiap tahunnya;
- c) Sebagai tolok ukur dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat; dan
- d) Sebagai acuan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dispusipda secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:





BAB I : PENDAHULUAN,

Bab ini memuat latar belakang penyusunan Renstra Perubahan, landasan hukum penyusunan Renstra, maksud dan tujuan penyusunan Renstra Perubahan dan sistematika penulisan dokumen Renstra Perubahan Perubahan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH,

Bab ini memuat tugas, fungsi dan struktur organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat; sumber daya yang dimiliki oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat, kinerja pelayanan sampai saat ini, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH,

Bab ini memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat, telaahan Renstra Kementerian Lembaga; telaahan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat; serta penentuan isu-isu strategis di bidang perpustakaan dan kearsipan.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN,

Bab ini memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN,

Bab ini memuat strategi dan kebijakan dalam menjabarkan sasaran jangka menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat.

BAB VI : RENCANA PROGRAM/KEGIATAN SERTA PENDANAAN,

Bab ini memuat tentang rencana program dan kegiatan, serta pendanaan pelaksanaan kinerja pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat selama 3 (tiga) tahun.

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN,

Bab ini memuat indikator kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang akan dicapai dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah.

BAB VIII : PENUTUP.

Bab ini memuat tentang kesimpulan Rencana Strategis Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026





BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan dijelaskan melalui analisis indikator capaian kinerja pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki, capaian-capaian penting yang telah dihasilkan periode sebelumnya, capaian program prioritas RPJMD periode sebelumnya, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dan dinilai perlu di atasi di masa mendatang.

Dispusipda Provinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memberikan pelayanan di bidang perpustakaan dan kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan dukungan struktur terdiri atas Kepala Badan, Sekretariat, 5 (lima) Bidang yaitu: Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan, Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan, Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, dan Bidang Pengelolaan Arsip Statis.

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

a. Tugas Pokok dan Fungsi Dispusipda

Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dispusipda mempunyai tugas pokok Dispusipda Provinsi Jawa Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan wajib bidang perpustakaan dan bidang kearsipan, meliputi perpustakaan deposit dan pengembangan bahan perpustakaan, bina perpustakaan dan budaya gemar membaca, pelayanan perpustakaan dan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, serta pengelolaan arsip statis yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi, serta berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Dispusipda Provinsi Jawa Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.





b. Struktur Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Susunan Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, membawahkan Subbagian Tata Usaha;
3. Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan;
4. Bidang Bina Perpustakaan, dan Budaya Gemar Membaca;
5. Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan;
6. Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis;
7. Bidang Pengelolaan Arsip Statis;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.





Secara umum Struktur Organisasi Dispusipda dapat digambarkan:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dispusipda Provinsi Jawa Barat

2.2 Sumber Daya Dispusipda

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dispusipda Provinsi Jawa Barat memanfaatkan sumber daya yang dimiliki, baik itu sumber daya manusia, Sarana dan Prasarana. Berikut uraian singkat tentang sumber daya yang dimiliki Dispusipda Provinsi Jawa Barat sampai dengan Desember 2023.

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan data Sekretariat Dispusipda Provinsi Jawa Barat bulan Desember 2023 Jumlah Pegawai Dispusipda Provinsi Jawa Barat seluruhnya berjumlah 124 orang, dengan tingkat pendidikan dan jumlah pegawai menurut pangkat/golongan dapat dilihat pada tabel berikut:





Tabel 2.1

Pegawai Berdasarkan Golongan Tahun 2023

| NO | GOLONGAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|----------|--------|------------|
| 1. | IV | 42 | |
| 2. | III | 62 | |
| 3. | II | 20 | |
| | Jumlah | 124 | |

Sumber: Dispusipda Tahun 2023

Tabel 2.2

Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2023

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|------------|--------|------------|
| 1. | S.3 | 1 | |
| 2. | S.2 | 25 | |
| 3. | S.1. | 53 | |
| 4. | D.IV | 3 | |
| 5. | D. III | 18 | |
| 6. | SMA | 24 | |
| | Jumlah | 124 | |

Sumber: Dispusipda Tahun 2023

Tabel 2.3

Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2023

| NO | JENIS KELAMIN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------------|--------|------------|
| 1. | Laki-laki | 56 | |
| 2. | Perempuan | 68 | |
| | Jumlah | 124 | |

Sumber: Dispusipda Tahun 2023

1. Sarana dan Prasarana
2.1. Sarana dan Prasarana

Selain sumber daya manusia, Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya juga membutuhkan dukungan sarana dan prasarana kerja. Jenis sarana dan prasarana kerja berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi. Adapun untuk sarana dan prasarana kerja Dispusipda dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4

Aset/modal yang dimiliki oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

| NO | ASET YANG TERSEDIA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|---------------------|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | TANAH | | |
| 1. | Sebidang Tanah | 12.500 m2 | Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 Kota Bandung |
| | PERALATAN DAN MESIN | | |





| NO | ASET YANG TERSEDIA | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. | Alat Angkut Roda 4 (empat) | 26 unit | |
| 2. | Alat Angkut Roda 2 (dua) | 20 unit | |
| 3. | Alat Kantor Rumah Tangga | 11.950 unit | |
| 4. | Alat Studio dan Komunikasi | 129 unit | |
| 5. | Alat laboratorium | 4 unit | |
| | | | |
| | GEDUNG DAN BANGUNAN | | |
| 1. | Gedung Arsip | 10.000 m2 | Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 |
| 2. | Gedung Perpustakaan Umum | 5.380 m2 | Jalan Kawalayaan Indah II No. 4 |
| | ASSET TETAP LAINNYA | | |
| 1. | Buku | 130.956 judul (560.262 eksemplar) | |
| 2. | Lukisan | 5 unit | |
| 3. | Compact Disk | 2.364 buah | |
| 4. | Koleksi KCKR Perpustakaan Deposit | 23.153 judul (45.325 eksamplar) | |

Sumber data : Buku Inventaris Barang Tahun 2023

Tabel 2.5
Sarana dan Prasarana Urusan Perpustakaan

| NO. | NAMA SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|--|-----------|------------------------------|
| A | Tanah dan Gedung Perpustakaan Umum Daerah (Gedung Perpustakaan Bertaraf Internasional) | 4000 m2 | Jalan Kawalayaan Indah No. 4 |
| 1. | Aksesibilitas Kaum Difable | 10,37 m2 | Akses Pintu Masuk Utama GPBI |
| 2. | Area Theatre Terbuka Perpustakaan | 13,35 m2 | Lahan Timur GPBI |
| 3. | Area Prasasti Kabupaten/Kota seJawa Barat | 361,80 m2 | Lahan Timur GPBI |
| 4. | Lobby | 204,29 m2 | Lantai 1 GPBI |
| 5. | Hall | 242,13 m2 | Lantai 1 GPBI |
| 6. | Coffee Shop | 123,59 m2 | Lantai 1 GPBI |
| 7. | Ruang Baca Anak | 277,78 m2 | Lantai 1 GPBI |
| 8. | Galeri Kabupaten/Kota | 361,91 m2 | Lantai 1 GPBI |
| 9. | Ruang Simpan Buku Perpustakaan Keliling | 71,00 m2 | Lantai 1 GPBI |
| 10. | Ruang Baca Remaja | 286,95 m2 | Lantai 2 GPBI |
| 11. | Ruang Baca Dewasa | 159,26 m2 | Lantai 2 GPBI |
| 12. | Ruang Diskusi | 49,49 m2 | Lantai 2 GPBI |
| 13. | Ruang Kepala Bidang | 42,19 m2 | Lantai 2 GPBI |





| NO. | NAMA SARANA PRASARANA PERPUSTAKAAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|--|-----------|--------------------------|
| 14. | Ruang Referensi | 264,09 m2 | Lantai 2 GPBI |
| 15. | Ruang Baca Koran/Majalah/Terbitan Berkala | 147,22 m2 | Lantai 2 GPBI |
| 16. | Ruang Audio Visual | 36,57 m2 | Lantai 2 GPBI |
| 17. | Aula | 536,72 m2 | Lantai 3 GPBI |
| 18. | Ruang Rapat | 99,22 m2 | Lantai 3 GPBI |
| 19. | Ruang Tunggu VIP | 67,90 m2 | Lantai 3 GPBI |
| 20. | Ruang Ganti | 111,38 m2 | Lantai 3 GPBI |
| 21. | Lahan Parkir | 382 m2 | Lahan Selatan GPBI |
| B | Peralatan | | |
| 1. | Buku tamu on-line | 5 Unit | Layanan PerpustakaanGPBI |
| 2. | Aplikasi sistem katalog on-line/OPAC (On-line Publik Access Catalogue) | 4 unit | Layanan PerpustakaanGPBI |
| 3. | Wi-Fi Area | 1 unit | Area GPBI |
| 4. | Escalator | 3 unit | GPBI |
| 5. | Lift | 2 unit | GPBI |
| 6. | Genset | 1 unit | Lahan Barat GPBI |
| C | Peralatan/Kendaraan | | |
| 1 | Server | 5 unit | |
| 2 | Komputer | 100 unit | |
| 3 | Laptop | 15 unit | |
| 4 | Infocus | 7 unit | |
| 5 | Mobil Perpustakaan Keliling | 6 unit | |
| 6 | Book scanner | 1 unit | |

Sumber data : Buku Inventaris Barang Tahun 2023

Tabel 2.6
Sarana dan Prasarana Bidang Kearsipan

| NO | NAMA SARANA PRASARANA KEARSIPAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|----|--|-----------|---------------------------------|
| A | Tanah dan Gedung Depo Arsip Pemerintah Provinsi Jawa Barat | 10.000 m2 | Jalan Kawaluyaan Indah II No. 4 |
| 1. | Ruang Preservasi Arsip | 155,88 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 2. | Ruang Layanan PenggunaArsip | 69,120 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 3. | Ruang Perpustakaan khusus Dispusipda | 51,840 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 4. | Ruang Theatre Dispusipda | 51,840 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 5. | Ruang Records Centre Dispusipda | 32,940 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 6. | Ruang Data Centre | 77,760 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 7. | Ruang Sekretariat Asosiasi Arsiparis Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Barat | 31,05 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| B | Depo/Ruang Simpan Arsip | | |
| √ | Depo Arsip Dinamis | | |





| NO | NAMA SARANA PRASARANA KEARSIPAN | JUMLAH | KETERANGAN |
|-----|---|------------------|--------------------------------------|
| 1. | Arsip Inaktif Keuangan Rutindan Kepegawaian | 1393,92 m2 | Lantai V dan VII Ged. Arsip |
| 2. | Arsip Inaktif Keuangan Proyekdan DIBALE | 696,960 m2 | Lantai VI Ged. Arsip |
| 3. | Arsip Vital Asset | 35,640 m2 | Lantai I Ged. Arsip |
| 4. | Arsip Vital Non Asset | 696,960 m2 | Lantai IV Ged. Arsip |
| √ | Depo Arsip Statis | | |
| 1. | Arsip Statis Konvensional | 696,960 m2 | Lantai III Ged. Arsip |
| 2. | Arsip Statis Media Baru | 51,840 m2 | Lantai IV Ged. Arsip |
| C | Peralatan/Kendaraan | | |
| 1. | Rak Besi | 3099 buah | Lantai III s.d VII Ged. Arsip |
| 2. | Roll O'pack | 91 unit | Lantai III s.d V Ged. Arsip |
| 3. | Komputer | 74 unit | |
| 4. | Aplikasi SIMKA | 3 aplikasi | Lantai I Ged. Arsip |
| 5. | Meja Sortir Arsip | 2 unit | Lantai VII Ged. Arsip |
| 6. | Filling Cabinnet | 61 unit | |
| 7. | Lemari Arsip Peta/Gambar | 9 buah | Lantai IV Ged. Arsip Sayap A |
| 8. | Lemari Kayu Arsip Media Baru | 29 unit | Lantai IV Ged. Arsip |
| 9. | Lemari Besi Arsip Vital | 2 unit | Lantai I Ged. Arsip |
| 10. | Dehumadifier | 6 unit | |
| 11. | Thermohygrograft | 10 unit | |
| 12. | Pintu Besi Ruang Arsip Vital | 1 set | Lantai I Ged. Arsip |
| 13. | Filing Kartu | 7 buah | |
| 14. | Sistem Proteksi Arsip (indoor)FM 200 | 2 unit | Lantai III dan IV Ged. Arsipsayap A |
| 15. | Alat Pemadam Api Tabung | 24 tabung | |
| 16. | Mesin Absen Digital | 5 Unit | Lantai I Ged. Arsip dan Lantai IGPBI |
| 17. | Microfilm (processor dan reader) | 2 unit | |
| 18. | Mobil Layanan MasyarakatSadar Arsip | 2 unit | |
| 19. | CCTV | 1 set (48 titik) | |

Sumber data : Buku Inventaris Barang Tahun 2023

Tabel 2.7
Jumlah Koleksi Bahan Perpustakaan Tahun 2023

| NO | JENIS BAHAN PERPUSTAKAAN | TAHUN | JUMLAH | |
|----|--|-------|---------|-----------|
| | | | JUDUL | EKSEMPLAR |
| 1 | Monograf (Buku) | 2023 | 126.698 | 528.395 |
| 2 | Serial (Surat Kabar, Majalah, Bulletin dan Jurnal) | | 11.308 | 51.210 |
| 3 | Kartografis (Atlas, Peta danGlobe) | | 63 | 469 |
| 4 | Audio Visual (VCD, Video, CD danKaset Audio) | | 2.221 | 2.221 |





| | | | | |
|---|--------------------|--|-------|-------|
| 5 | Digital dan e-book | | 8.572 | 9.520 |
| 6 | Braille | | 1.344 | 1.344 |

Sumber data : Buku Inventaris Barang Tahun 2023

Tabel 2.8
Volume Arsip Tahun 2023

| NO | JENIS ARSIP | JUMLAH | TAHUN |
|----|--|--------------|-------|
| 1 | Arsip dinamis inaktif retensi 10 tahun lebih | 66.520 boks | 2023 |
| 2 | Arsip statis Konvensional | | |
| | Kertas/konvensional | 12.845 boks | 2023 |
| | Kertas/Konvensional | 2.828 jilid | |
| | Kartografi/peta | 2.056 lembar | |
| | Kearsitekturan | 233 lembar | |
| 3 | Arsip statis media baru | | |
| | Arsip Foto | 6.549 lembar | 2023 |
| | Kaset video VHS/Betamax | 41 buah | |
| | Kaset rekaman suara | 40 buah | |

Sumber data : Buku Inventaris Barang Tahun 2023

2.2.2. Unit Usaha yang masih Operasional

Dispupda Provinsi Jawa Barat memiliki aset berupa ruangan yang digunakan sebagai kantin dan komersil/pribadi/komunitas dan sewa aset lainnya meliputi denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan yang memiliki potensi untuk memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Tabel 2.9
Unit Usaha Dispupda Provinsi Jawa Barat

| No | Unit Usaha | Harga |
|----|--|------------------------|
| 1. | Kantin | Rp. 2.464.000,00/tahun |
| 2. | Kantin | Rp. 5.760.000,00/tahun |
| 3. | Aula Graha Pustaloka | Rp.2.500.000,00 |
| 4. | Aula Graha Pustaloka | Rp.5.000.000,00 |
| 5. | Denda keterlambatan pengembalian buku perpustakaan | Rp.500/buku/hari |

2.3 Kinerja Pelayanan Dispupda

Dispupda Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, berpedoman pada Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 64 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan tersebut bahwa Dispupda Provinsi Jawa Barat memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan. Selanjutnya, dalam menyelenggarakan tugas pokok terkait perpustakaan dan kearsipan, Dispupda memiliki fungsi, yaitu diantaranya menyelenggarakan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Beberapa layanan yang dilaksanakan oleh Dispupda Provinsi Jawa Barat, antara lain :





- a. Fasilitasi Story Telling;
- b. Wakaf Buku;
- c. Keanggotaan Perpustakaan Umum Jawa Barat;
- d. Kunjungan Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat;
- e. Kunjungan Perpustakaan Deposit;
- f. Candil (Maca Dina Digital) e-Library;
- g. Perpustakaan Keliling;
- h. Pelayanan Kearsipan;
- i. Kunjungan Perpustakaan Umum Daerah;
- j. Peminjaman dan Pengembalian Buku;
- k. Kunjungan Kearsipan;
- l. Perbaikan Khusus Arsip untuk Korporasi dan Keluarga (Pusaka);
- m. Pembinaan Kepustakawanan;
- n. Akreditasi Perpustakaan;
- o. *Book Bulk Loan*;
- p. Digitalisasi Arsip Bagi Masyarakat
- q. Jam Bimbingan Pemustaka.

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) dan Renstra Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, terdapat 11 (sebelas) sasaran strategis, Dinas yang diukur melalui 24 (dua puluh empat) indikator sasaran. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran strategis tersebut, diperoleh capaian kinerja dengan rincian sebagai berikut (tabel 2.10) di bawah ini :





Kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat selain dapat diukur dari ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan seiring dengan misi yang dimiliki oleh Kepala Daerah terpilih, sebagaimana tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah (RPJMD), juga digambarkan melalui kinerja anggaran dan realisasi pendanaan pembangunan sebagaimana terlihat pada tabel 2.10 dan tabel 2.11 sebagai berikut :



Tabel 2.10.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat

| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|-----|---|--------------------------|-------------------------------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------------------------|------------|-------|------------|------------|------------|-------------------------|-------|--------|--------|--------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1. | Jumlah koleksi bahan perpustakaan Dispusipda Provinsi Jawa Barat sesuai SNP | | 4.507 eks | - | - | - | - | - | 6.686 eks | - | - | - | - | - | 148,35 | - | - | - | - | - |
| 2. | Jumlah pembinaan lembaga perpustakaan | | 803 unit | - | - | - | - | - | 803 unit | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 3. | Jumlah pembinaan sumber daya manusia pengelola perpustakaan | | 1.306 orang | - | - | - | - | - | 1.502 orang | - | - | - | - | - | 115,01 | - | - | - | - | - |
| 4. | Tingkat kepuasan pemustaka | | 90% | - | - | - | - | - | 90% | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 5. | Jumlah peningkatan pengunjung | | 566.389 orang | - | - | - | - | - | 594.732 orang | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - |
| 6. | Persentase OPD yang telah memenuhi standard baku | | 20% | - | - | - | - | - | 21% | - | - | - | - | - | 105,00 | - | - | - | - | - |
| 7. | Jumlah data arsip di unit kearsipan | | 6.000 boks | - | - | - | - | - | 6.000 boks | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 8. | Persentase bahan perpustakaan yang dipreservasi | | 2.38% | - | - | - | - | - | 2,5% | - | - | - | - | - | 105,04 | - | - | - | - | - |
| 9. | Persentase bahan perpustakaan yang dialihmedia-kan | | 0,32% | - | - | - | - | - | 1.81% | - | - | - | - | - | 565,63 | - | - | - | - | - |
| 10. | Jumlah arsip yang digitalisasi/ dialihmediakan | | 3.000 lembar | - | - | - | - | - | 1.000 lembar | - | - | - | - | - | 33,33 | - | - | - | - | - |
| 11. | Jumlah arsip yang dipreservasi | | 220 lembar | - | - | - | - | - | 120 lembar | - | - | - | - | - | 54,55 | - | - | - | - | - |
| 12. | Jumlah arsip yang diselamatkan dan di manfaatkan | | 1 Khasanah | - | - | - | - | - | 8 Khasanah | - | - | - | - | - | 800,00 | - | - | - | - | - |
| 13. | Tingkat ketersediaan fasilitas membaca | | - | 62,92 poin | 63,23 Poin | - | - | - | - | 62,76 poin | 52,33 | - | - | - | - | 99,75 | 82,76 | - | - | - |
| 14. | Tingkat kebiasaan membaca masyarakat | | - | 68,02 poin | 68,36 Poin | - | - | - | - | 67,68 poin | 63,54 | - | - | - | - | 99,50 | 92,95 | - | - | - |
| 15. | Tingkat pemanfaatan bahan bacaan | | - | 74,58 poin | 74,95 Poin | - | - | - | - | 74,39 poin | 68,61 | - | - | - | - | 99,75 | 91,54 | - | - | - |
| 16. | Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara tertib | | - | 52% | 59% | 30 Persen | 45 Persen | 74% | - | 11% | 11% | 57,89 % | 73,68 % | 94,73% | - | 21,15 | 18,64 | 192,97 | 163,73 | - |
| 17. | Persentase penyelamatan dan pelestarian arsip statis | | - | 31% | - | 48% | 68% | 88% | - | 31% | - | 48% | 68% | 88% | - | 100 | - | 100 | 100 | - |
| 18. | Persentase penyelamatan arsip statis | | - | - | 17% | - | - | - | - | - | 3% | - | - | - | - | - | 17,65 | - | - | - |
| 19. | Persentase pelestarian arsip statis | | - | - | 17% | - | - | - | - | - | 66% | - | - | - | - | - | 388,24 | - | - | - |
| 20. | Indeks Membaca Masyarakat | | - | - | - | 62 Poin | 63 Poin | 64 Poin | - | - | - | 61,49 Poin | 61,49 Poin | 69,06 Poin | - | - | - | 99,18 | 97,60 | - |
| 21. | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | | - | - | - | 69 Poin | 71 Poin | 72 Poin | - | - | - | 65,34 Poin | 70,10 Poin | 70,47 Poin | - | - | - | 94,70 | 98,73 | - |



| No | Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD | Target Indikator Lainnya | Target Renstra SKPD Tahun ke- | | | | | | Realisasi Capaian Tahun ke- | | | | | | Rasio Capaian Tahun ke- | | | | | |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|------|------|------------|-------------|------------|-----------------------------|------|------|------------|------------|-------------|-------------------------|------|------|------|--------|------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 22. | Nilai laporan Audit Kearsipan Internal | | - | - | - | Kategori B | Kategori BB | Kategori A | - | - | - | Kategori B | Kategori B | Kategori AA | - | - | - | 100 | 75,00 | - |
| 23. | Persentase Akuisisi dan Pelestarian arsip Statis | | - | - | - | 35% | 50% | 68% | - | - | - | 35% | 68% | 68% | - | - | - | 100 | 136,00 | - |



Tabel 2.11.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

| Uraian | Anggaran Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|--|--------------------|-------------------|------|------|------|------|------------------------------|-------------------|------|------|------|---|----------------|------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | | | | | | | | - | - | - | - | | - | - | - | - | - | - |
| Pengembangan Bahan Perpustakaan Dispusipda Jabar | 1.432.771.550,00 | - | - | - | - | - | 1.413.151.095,00 | - | - | - | - | 19.620.455,00 | - | - | - | - | - | - |
| Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat serta Implementasi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1990 | 667.103.500,00 | - | - | - | - | - | 653.739.471,00 | - | - | - | - | 13.364.029,00 | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Kualitas Kelembagaan Perpustakaan dan Sumber Daya Manusia Bidang Perpustakaan | 982.175.000,00 | - | - | - | - | - | 974.696.550,00 | - | - | - | - | 7.478.450,00 | - | - | - | - | - | - |
| Membina Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan di Jawa Barat | 957.825.000,00 | - | - | - | - | - | 927.189.200,00 | - | - | - | - | 30.635.800,00 | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | 1.562.534.000,00 | - | - | - | - | - | 1.559.355.057,00 | - | - | - | - | 3.178.943,00 | - | - | - | - | - | - |
| Pengembangan Kerjasama Perpustakaan Bertaraf Internasional | 24.990.000,00 | - | - | - | - | - | 24.755.000,00 | - | - | - | - | 235.000,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Peningkatan Pengelolaan Arsip Dinamis | 1.182.780.000,00 | - | - | - | - | - | 1.087.231.750,00 | - | - | - | - | 95.548.250,00 | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pembinaan Kearsipan | 449.795.000,00 | - | - | - | - | - | 438.424.500,00 | - | - | - | - | 11.370.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pelayanan Kearsipan | 673.448.000,00 | - | - | - | - | - | 661.596.343,00 | - | - | - | - | 11.851.657,00 | - | - | - | - | - | - |
| Akuisisi dan Pengolahan Arsip di Depo Arsip Statis | 666.170.000,00 | - | - | - | - | - | 630.677.050,00 | - | - | - | - | 35.492.940,00 | - | - | - | - | - | - |
| Preservasi Arsip Statis | 175.300.000,00 | - | - | - | - | - | 174.773.510,00 | - | - | - | - | 526.490,00 | - | - | - | - | - | - |
| Pembinaan Pengelolaan Arsip Statis | 99.487.500,00 | - | - | - | - | - | 95.814.000,00 | - | - | - | - | 3.673.500,00 | - | - | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | - | 11,182,041,921.00 | - | - | - | - | - | 10,926,926,317.00 | - | - | - | - | 255.115.604,00 | - | - | - | - | - |
| Program Pelestarian Koleksi Naskah Kuno | - | 453,386,800.00 | - | - | - | - | - | 434,709,740.00 | - | - | - | - | 18.677.060,00 | - | - | - | - | - |
| Program Pengembangan dan Pembinaan Kearsipan | - | 2,898,969,800.00 | - | - | - | - | - | 2,860,517,169.00 | - | - | - | - | 38.452.631,00 | - | - | - | - | - |



| Uraian | Anggaran Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|--------------------|------------------|------------------|------|------|------|------------------------------|------------------|------------------|------|------|---|---------------|----------------|------|------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | - | 1,362,392,756.00 | - | - | - | - | - | 1,351,177,392.00 | - | - | - | - | 11.215.364,00 | - | - | - | - | - |
| Program Peningkatan Pelayanan Kearsipan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perluasan Akses Pelayanan Kearsipan | - | - | 355,940,600,00 | - | - | - | - | - | 352,157,300,00 | - | - | - | - | 3.783.300,00 | - | - | - | - |
| Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pelayanan Perpustakaan | - | - | 676,958,100,00 | - | - | - | - | - | 674,553,100 | - | - | - | - | 2.405.000,00 | - | - | - | - |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pengelolaan Arsip Statis | - | - | 615,688,924,00 | - | - | - | - | - | 610,196,099,00 | - | - | - | - | 5.492.825,00 | - | - | - | - |
| Program Penyelamatan dan Pelestarian arsip Statis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelestarian dan Preservasi Arsip | - | - | 256,471,430,00 | - | - | - | - | - | 253,254,430,00 | - | - | - | - | 3.217.000,00 | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Bahan Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengembangan Bahan Perpustakaan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota | - | - | 200,000,000,00 | - | - | - | - | - | 195,710,055,00 | - | - | - | - | 4.289.945,00 | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Bahan Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelestarian Naskah Kuno Jawa Barat | - | - | 37,398,562,00 | - | - | - | - | - | 36,735,000,00 | - | - | - | - | 663.562,00 | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Bahan Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengembangan Bahan Perpustakaan Koleksi Perpustakaan Umum Provinsi Jawa Barat | - | - | 3,654,104,032,00 | - | - | - | - | - | 3,496,286,439,00 | - | - | - | - | 157.817.593,00 | - | - | - | - |
| Program Pengembangan Bahan Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Khasanah Budaya Jawa Barat | - | - | 200,582,740,00 | - | - | - | - | - | 190,028,763,00 | - | - | - | - | 10.553.977,00 | - | - | - | - |
| Program Pengelolaan dan pengembangan Arsip Dinamis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Pembinaan Kearsipan | - | - | 690,153,909,00 | - | - | - | - | - | 619,236,800,00 | - | - | - | - | 70.917.109,00 | - | - | - | - |
| Program Pengelolaan dan pengembangan Arsip Dinamis | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



| Uraian | Anggaran Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|--|--------------------|------|----------------|------------------|----------------|---------------|------------------------------|------|----------------|------------------|----------------|---|------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Pengelolaan Arsip Dinamis | - | - | 830.447.825,00 | - | - | - | - | - | 792.071.740,00 | - | - | - | - | 38.376.085,00 | - | - | - | - |
| Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia di Bidang Perpustakaan | - | - | 841.715.838,00 | - | - | - | - | - | 815.841.341,00 | - | - | - | - | 25.874.497,00 | - | - | - | - |
| Program Pembinaan Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pembinaan Budaya Baca dan Memberdayakan Perpustakaan | - | - | 889.388.294,00 | - | - | - | - | - | 840.954.516,00 | - | - | - | - | 48.433.778,00 | - | - | - | - |
| Program Pembinaan Perpustakaan | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | - | - | - | 3.865.300.617,00 | 512.216.250,00 | 1.928.842.123 | - | - | - | 3.790.377.598,00 | 505.615.966,00 | - | - | - | 74.923.019,00 | 6.600.284,00 | - | - |
| Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | - | - | - | 406.529.769,00 | 144.333.035,00 | 177.629.925 | - | - | - | 371.950.448,00 | 144.333.035,00 | - | - | - | 34.579.321,00 | - | - | - |
| Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | - | - | - | 47.456.500,00 | 4.510.250,00 | 11.423.000 | - | - | - | 47.456.500,00 | 4.390.676,00 | - | - | - | - | 119.574,00 | - | - |
| Penerbitan Katalog Induk daerah dan Bibliografi Daerah | - | - | - | 51.463.200,00 | - | 15.040.000 | - | - | - | 46.491.800,00 | - | - | - | - | 4.971.400,00 | - | - | - |
| Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | - | - | - | 47.952.000,00 | 26.175.000,00 | 44.200.000 | - | - | - | 47.952.000,00 | 26.175.000,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah | - | - | - | - | 12.186.500,00 | 15.020.000 | - | - | - | - | 12.046.190,00 | - | - | - | - | 140.310,00 | - | - |
| Program Pengelolaan Arsip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pengelolaan Arsip Dinamis | - | - | - | 1.128.597.710,00 | 579.945.800,00 | 471.277.498 | - | - | - | 1.096.735.456,00 | 575.577.828,00 | - | - | - | 31.862.254,00 | - | - | - |
| Pengelolaan Arsip Statis | - | - | - | 421.613.045,00 | 209.999.844,00 | 204.879.100 | - | - | - | 417.782.945,00 | 206.897.280,00 | - | - | - | 3.830.100,00 | 3.102.564,00 | - | - |
| Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | - | - | - | 78.626.500,00 | 40.625.000,00 | - | - | - | - | 78.624.500,00 | 39.866.500,00 | - | - | - | 2.000,00 | 758.500,00 | - | - |



| Uraian | Anggaran Tahun Ke- | | | | | | Realisasi Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke- | | | | | Rata-rata pertumbuhan | |
|---|--------------------|------|------|----------------|------|-------------|------------------------------|------|------|----------------|------|---|------|------|---------------|------|-----------------------|-----------|
| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Anggaran | Realisasi |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang memiliki Retensi dibawah 10 Tahun | - | - | - | 4.897.600,00 | - | - | - | - | - | 4.897.600,00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | - | - | - | 185.870.230,00 | - | - | - | - | - | 179.942.230,00 | - | - | - | - | 5.928.000,00 | - | - | - |
| Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | - | - | - | 149.082.311,00 | - | - | - | - | - | 129.132.311,00 | - | - | - | - | 19.950.000,00 | - | - | - |
| Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola Oleh Lembaga Kearsipan Provinsi | - | - | - | 254.311.850,00 | - | 121.119.700 | - | - | - | 218.554.390,00 | - | - | - | - | 35.757.460,00 | - | - | - |
| Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang | - | - | - | 184.625.817,00 | - | - | - | - | - | 177.695.817,00 | - | - | - | - | 6.930.000,00 | - | - | - |
| Program Perizinan Penggunaan Arsip | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Daerah Provinsi | - | - | - | 10.886.000,00 | - | - | - | - | - | 10.865.000,00 | - | - | - | - | 21.000,00 | - | - | - |





2.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, Dispusipda Kabupaten/Kota dan Masyarakat.

2.5 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Urusan pemerintahan bidang perpustakaan memiliki tantangan berupa melayani animo masyarakat berkunjung ke perpustakaan yang akan meningkat secara kuantitas maupun kualitas, terutama memasuki era digitalisasi atau memasuki revolusi industri 4.0 yaitu suatu kondisi pemanfaatan kemajuan teknologi digital yang canggih, dan masyarakat sudah saling terkait dengan adanya kemajuan teknologi digital tersebut. sehingga Pemberdayaan Kegemaran Membaca (PKM) melalui gerakan gemar membaca pada masyarakat, keluarga, dan satuan-satuan sekolah sudah saatnya memanfaatkan kemajuan teknologi digital tersebut.

Apabila PKM telah dapat dilaksanakan secara efektif maka target mewujudkan perpustakaan untuk memberikan pelayanan yang berbasis inklusi sosial tercapai yaitu pengelolaan perpustakaan harus melakukan pendekatan sosial, maka pengelolaan perpustakaan agar dirancang memiliki nilai kebermanfaatan yang tinggi untuk masyarakat, dan mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Tantangan Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang utama adalah mempersiapkan sumber daya manusia perpustakaan yang menguasai kemajuan teknologi digital, dan peningkatan fasilitas membaca yang berbasis teknologi digital. Salah satu tolok ukur adanya upaya pemanfaatan kemajuan TIK untuk urusan perpustakaan adalah TIK dapat digunakan sebagai sarana untuk mengintegrasikan system pengelolaan perpustakaan system pelayanan, pengembangan perpustakaan, dan Kerjasama perpustakaan.

Untuk urusan kearsipan pemanfaatan kemajuan TIK digunakan sebagai sarana dalam rangka menciptakan e-arsip melalui penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) maupun penerapan Sistem Informasi Kearsipan Statis (SIKS) yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja agar dapat digunakan secara maksimal dalam meningkatkan akuntabilitas instansi, umpan balik peningkatan kinerja pemerintah, meningkatkan perencanaan semua bidang, meningkatkan kredibilitas instansi, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja instansi pemerintah.

Sedangkan arsip-arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan akan menjadi bukti (*evidence*) sebagai memori kolektif suatu daerah yang pada tingkatan yang lebih luas dapat menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bagi pelaksanaan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.





Dispusipda Provinsi Jawa Barat sebagai dinas teknis daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan wajib perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah, memiliki peluang berupa penguatan kewenangan Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Peluang ini telah menimbulkan pengaruh berarti terhadap bentuk susunan organisasi, serta *performance* kinerja pelayanan Dinas.

Peluang urusan perpustakaan berkaitan dengan perencanaan strategis nasional telah menjadi bagian dari prioritas nasional pada prioritas pertama yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan. Maka urusan perpustakaan sesuai dengan kewenangan Perpustakaan Nasional RI, telah menetapkan tujuan pengembangan perpustakaan kedepan yaitu mewujudkan perpustakaan berbasis inklusi sosial dan menjadi bagian penting dalam mensejahterakan masyarakat.

Peluang urusan kearsipan berkaitan perencanaan strategis nasional yaitu telah menjadi bagian dari upaya untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional dengan karakteristik berintegrasi, dan berkinerja tinggi, bersih dari KKN, mampu melayani publik dengan baik, berdedikasi. Maka urusan kearsipan sesuai dengan kewenangan Arsip Nasional Republik Indonesia, telah menetapkan kebijakan pengawasan kearsipan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan arsip pada instansi pemerintah.

Dengan mempertimbangkan tantangan dan peluang seperti diatas, untuk 3 (tiga) tahun mendatang, Dispusipda Provinsi Jawa Barat perlu melakukan peningkatan kapasitas organisasi antara lain melalui :

1. Perubahan struktur kelembagaan organisasi untuk memenuhi peningkatan *performance* pelayanan;
2. Pemanfaatan dan penggunaan TIK sebagai sarana pelayanan;
3. Peningkatan ketersediaan SDM yang memiliki kompetensi penggunaan TIK;
4. Pembaharuan prosedur kerja;
5. Peningkatan anggaran program dan kegiatan secara proporsional.
6. Penciptaan iklim budaya kerja yang terbuka, berintegritas;
7. Komitmen pimpinan dalam pencapaian tujuan, dan sasaran strategis organisasi.





BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispusipda

Dispusipda mengampu urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perpustakaan dan kearsipan dalam pelaksanaan tugas dituntut meningkatkan literasi masyakat dan pengelolaan arsip yang tertib dan aman. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|----------------------------------|---|--|
| 1. | Literasi Masyarakat masih rendah | Pemerataan Layanan Perpustakaan masih rendah | Jangkauan armada perpustakaan keliling yang terbatas |
| | | | Jumlah sumber daya manusia masih terbatas |
| | | | Belum optimalnya peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pelayanan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat |
| | | Ketercukupan koleksi bahan pustaka masih rendah | Masih sedikit penerbit yang tiap tahunnya mengeluarkan buku cetak baru sedangkan kebutuhan membeli buku paling tua 3 tahun |
| | | | Kurang maksimalnya dalam pengajuan bahan perpustakaan |
| | | | Koleksi tidak <i>update</i> |
| | | Ketercukupan tenaga perpustakaan masih rendah | Masih sedikitnya pengelola perpustakaan yang bersertifikat kebanyakan pengelola perpustakaan terutama di sekolah adalah guru yang tidak berlatar belakang pendidikan perpustakaan tapi hanya untuk mengisi kekurangan jam mengajar |
| | | Tingkat Kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan masih rendah | Fasilitas dan suasana Perpustakaan yang monoton belum ada pembaharuan |
| | | Perpustakaan yang memiliki standar nasional perpustakaan masih terbatas | Belum ada peraturan yang mewajibkan bahwa perpustakaan harus sesuai standar |
| | | Keterlibatan masyarakat dalam | Kurangnya tenaga perpustakaan dalam mensosialisasikan kegiatan ke masyarakat |





| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---|---|---|
| | | kegiatan sosialisasi masih rendah | Masyarakat masih menganggap perpustakaan hanya sarana untuk meminjam buku |
| | | Keanggotaan perpustakaan masih rendah | Fasilitas pembuatan kartu anggota perpustakaan masih manual dan belum ada penambahan mesin pembuat kartu anggota |
| | | | Jumlah mesin pembuat kartu anggota masih menggunakan manual |
| 2 | Pengelolaan arsip belum tertib dan aman | Akses penggunaan arsip belum efektif | Perangkat daerah belum membuat daftar arsip aktif dan inaktif secara efektif |
| | | Kurangnya sosialisasi PUSAKA (Perbaikan Khusus Arsip Korporasi dan Keluarga) | Aplikasi PUSAKA baru di-launching tanggal 1 Maret 2023 pada saat Forum OPD, yang merupakan pengembangan dari aplikasi LAPARMAS (Layanan Perbaikan Arsip Masyarakat) |
| | | Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis | Perangkat Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana kearsipan pada TU Bidang dan sekretariat maupun unit kearsipan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan |
| | | Penelusuran arsip lembaga yang digabung/dihapus/diubah status yang bernilai kesejarahan belum efektif | Lembaga Pencipta arsip yang digabung/dihapus/diubah status seringkali tidak menyimpan arsip yang autentik sehingga sulit untuk pelaksanaan akuisisi arsip-arsipnya |
| | | Penelusuran arsip tokoh/perorangan belum efektif | Tokoh/perorangan belum menyimpan arsipnya masa kehidupannya secara tertib sehingga akuisisi arsipnya menjadi sulit, terlebih lagi jika tokoh/ perorangannya sudah meninggal |
| | | Penurunan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | Tumpulnya sanksi terhadap pimpinan yang tidak melaksanakan pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah sesuai dengan dalam UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan |
| | | Menurunnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | Kurangnya respon pimpinan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan-temuan pada audit kearsipan internal yang dilakukan sejak tahun 2019-2022 |
| | | | SDM kearsipan pada TU bidang/sekretariat merangkap dengan jabatan lain dan tugas |





| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah |
|-----|---------------|---|--|
| | | | kearsipan dijadikan tugas tambahan |
| | | Pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib | Ketersediaan SDM Kearsipan dan sarana prasarana yang belum disediakan oleh pimpinan Unit Kearsipan Perangkat Daerah |
| | | Penurunan persentase penyelamatan arsip statis | Kurangnya pemahaman tentang kriteria arsip statis sebagai arsip permanen dari perangkat daerah sehingga menjadikan terbatasnya arsip statis yang diserahkan |
| | | Menurunnya persentase penyusutan kearsipan | Tidak tersedianya Panitia Penilai Penyusutan arsip yang terdiri atas arsiparis ahli pertama, ahli muda dan ahli madya pada perangkat daerah |
| | | Kurang sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang pentingnya akuisisi arsip/penyelamatan arsip | SDM kearsipan/jafung arsiparis di perangkat daerah masih belum ada di setiap perangkat daerah |
| | | Kurangnya SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip) pada setiap Perangkat Daerah yang memahami pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan berdasarkan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Pembinaan kearsipan level Unit Kearsipan I dan Unit Kearsipan II belum berjalan efektif Banyaknya arsiparis yang merangkap jabatan (arsiparis sebagai Pengelola Keuangan) |

Sumber : Dispusipda, Tahun 2023

3.2 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga

Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga terkait merupakan cara untuk melaksanakan proses keselarasan urusan perpustakaan dan kearsipan antara tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Nasional. Untuk itu, dalam penyusunan Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat dilakukan telaahan terhadap Renstra Perpustakaan Nasional Republik Indonesia dan Arsip Nasional Republik Indonesia.

Visi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia

Terwujudnya Indonesia Cerdas Melalui Gemar Membaca dengan Memberdayakan Perpustakaan





Misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan koleksi nasional yang lengkap dan mutakhir.
2. Mengembangkan diversifikasi layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
3. Mengembangkan perpustakaan yang menjangkau masyarakat luas.
4. Mewujudkan tenaga perpustakaan yang kompeten dan profesional.
5. Menggalakkan sosialisasi/promosi/pemasyarakatan gemar membaca.
6. Mengembangkan infrastruktur Perpustakaan Nasional yang modern.

Visi Arsip Nasional RI

Menjadikan Arsip Sebagai Simpul Pemersatu Bangsa Dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang akan Dicapai Pada Tahun 2025

Misi yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

1. Memberdayakan arsip sebagai tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan;
 2. Memberdayakan arsip sebagai bukti akuntabilitas kinerja organisasi;
 3. Memberdayakan arsip sebagai alat bukti yang sah;
 4. Melestarikan arsip sebagai memori kolektif dan jati diri bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 5. Memberikan akses arsip kepada publik untuk kepentingan pemerintahan, pembangunan, penelitian, dan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan rakyat sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan demi kemaslahatan bangsa.
- 3.3. Telaahan Keterkaitan Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Salah satu tugas Dispusipda adalah menyelenggarakan urusan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Analisis lingkungan strategis yang menjelaskan tentang berbagai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh Dispusipda serta berbagai peluang dan tantangan yang berasal dari lingkungan eksternal. Berdasarkan kajian Tata Ruang dan Wilayah Geografis Dispusipda terdapat permasalahan pada letak spasial Gedung Dispusipda. Faktor pendukungnya adalah kondisi Gedung berada berdekatan jalan utama yang memudahkan akses pengunjung dan juga berdekatan dengan lokasi berbagai kampus pendidikan.





3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Penentuan Isu-isu strategis Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, didasarkan pada faktor-faktor pelayanan yang mempengaruhi permasalahan ditinjau dari :

- 1. Telaahan gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- 2. Telaahan Sasaran Renstra Kementerian/Lembaga;
- 3. Telaahan Implikasi Rencana Tata Ruang (RTRW), dan
- 4. Permasalahan di bidang perpustakaan dan kearsipan.

Dispusipda mengampu urusan wajib non pelayanan dasar di bidang perpustakaan dan kearsipan dalam pelaksanaan tugas dituntut meningkatkan literasi masyarakat dan pengelolaan arsip yang tertib dan aman. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan-permasalahan yang kemudian menjadi isu strategis pada urusan perpustakaan dan kearsipan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3.2
Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Isu Strategis
Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Isu Strategis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan |
|-----|----------------------------------|---|---|---|
| 1. | Literasi Masyarakat masih rendah | Pemerataan Layanan Perpustakaan masih rendah | Jangkauan armada perpustakaan keliling yang terbatas | Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia |
| | | | Jumlah sumber daya manusia masih terbatas | |
| | | | Belum optimalnya peran kelembagaan dan pemanfaatan teknologi dalam pengembangan pelayanan perpustakaan di Provinsi Jawa Barat | |
| | | Ketercukupan koleksi bahan pustaka masih rendah | Masih sedikit penerbit yang tiap tahunnya mengeluarkan buku cetak baru sedangkan kebutuhan membeli buku paling tua 3 tahun | |
| | | | Kurang maksimalnya dalam pengajuan bahan perpustakaan | |





| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Isu Strategis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan |
|-----|---|---|--|---|
| | | | Koleksi tidak <i>update</i> | |
| | | Ketercukupan tenaga perpustakaan masih rendah | Masih sedikitnya pengelola perpustakaan yang bersertifikat kebanyakan pengelola perpustakaan terutama di sekolah adalah guru yang tidak berlatar belakang pendidikan perpustakaan tapi hanya untuk mengisi kekurangan jam mengajar | |
| | | Tingkat Kunjungan masyarakat per hari ke perpustakaan masih rendah | Fasilitas dan suasana yang perpustakaan monoton belum ada pembaharuan | |
| | | Perpustakaan yang memiliki standar nasional perpustakaan masih terbatas | Belum ada peraturan yang mewajibkan bahwa perpustakaan harus sesuai standar | |
| | | Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi masih rendah | Kurangnya tenaga perpustakaan dalam mensosialisasikan kegiatan ke masyarakat | |
| | | | Masyarakat masih menganggap perpustakaan hanya sarana untuk meminjam buku | |
| | | Keanggotaan perpustakaan masih rendah | Fasilitas pembuatan kartu anggota perpustakaan masih manual dan belum ada penambahan mesin pembuat kartu anggota | |
| | | | Jumlah mesin pembuat kartu anggota masih menggunakan manual | |
| 2 | Pengelolaan arsip belum tertib dan aman | Akses penggunaan arsip belum efektif | Perangkat daerah belum membuat daftar arsip aktif dan inaktif secara efektif | Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah |
| | | Kurangnya sosialisasi PUSAKA (Perbaikan | Aplikasi PUSAKA baru di-launching tanggal 1 Maret | |





| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Isu Strategis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan |
|-----|---------------|---|---|---|
| | | Khusus Arsip Korposrasi dan Keluarga) | 2023 pada saat Forum OPD, yang merupakan pengembangan dari aplikasi LAPARMAS (Layanan Perbaikan Arsip Masyarakat) | |
| | | Sarana dan Prasarana belum sesuai dengan Perka ANRI Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pedoman Preservasi Arsip Statis | Perangkat Daerah belum menyediakan sarana dan prasarana kearsipan pada TU bidang dan sekretariat maupun unit kearsipan sesuai dengan kaidah-kaidah kearsipan | |
| | | Penelusuran arsip lembaga yang digabung/dihapus/ diubah status yang bernilai kesejarahan belum efektif | Lembaga Pencipta arsip yang digabung/dihapus/diubah status seringkali tidak menyimpan arsip yang autentik sehingga sulit untuk pelaksanaan akuisisi arsip- arsipnya | |
| | | Penelusuran arsip tokoh/perseorangan belum efektif | Tokoh/perseorangan belum menyimpan arsipnya masa kehidupannya secara tertib sehingga akuisisi arsipnya menjadi sulit, terlebih lagi jika tokoh/ perseorangannya sudah meninggal | |
| | | Penurunan persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | Tumpulnya sanksi terhadap pimpinan yang tidak melaksanakan pengelolaan arsip pada Perangkat Daerah sesuai dengan dalam UU Nomor 43/2009 tentang Kearsipan | |
| | | Menurunnya persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | Kurangnya respon pimpinan perangkat daerah dalam menindaklanjuti temuan- temuan pada audit kearsipan internal yang dilakukan sejak Tahun 2019-2022 | |
| | | | SDM kearsipan pada TU | |





| No. | Masalah Pokok | Masalah | Akar Masalah | Isu Strategis Bidang Perpustakaan dan Kearsipan |
|-----|---------------|---|---|---|
| | | | bidang/sekretariat merangkap dengan jabatan lain dan tugas kearsipan dijadikan tugas tambahan | |
| | | Pengelolaan arsip perangkat daerah atau pencipta arsip belum tertib | Ketersediaan SDM Kearsipan dan Sarana Prasarana yang belum disediakan oleh pimpinan Unit Kearsipan Perangkat Daerah | |
| | | Penurunan persentase penyelamatan arsip statis | Kurangnya pemahaman tentang kriteria arsip statis sebagai arsip permanen dari perangkat daerah sehingga menjadikan terbatasnya arsip statis yang diserahkan | |
| | | Menurunnya persentase penyusutan kearsipan | Tidak tersedianya Panitia Penilai Penyusutan arsip yang terdiri atas arsiparis ahli pertama, ahli muda dan ahli madya pada perangkat daerah | |
| | | Kurang sosialisasi kepada Perangkat Daerah tentang pentingnya akuisisi arsip/penyelamatan arsip | SDM kearsipan/jafung arsiparis di perangkat daerah masih belum ada di setiap perangkat daerah | |
| | | Kurangnya SDM (Arsiparis/Pengelola Arsip) pada setiap Perangkat Daerah yang memahami pengelolaan arsip yang sesuai dengan standar kearsipan berdasarkan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang kearsipan | Pembinaan kearsipan level Unit Kearsipan I dan Unit kearsipan II belum berjalan efektif | |
| | | | Banyaknya arsiparis yang merangkap jabatan (arsiparis sebagai Pengelola Keuangan) | |





Atas dasar hal tersebut, maka isu strategis yang perlu ditangani Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam menyelenggarakan kebijakan teknis bidang perpustakaan dan kearsipan adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia
2. Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah;





BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru (DOB), bahwa penentuan tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026 didasarkan pada Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2024-2026. Selain itu, tujuan dan sasaran Renstra ditentukan berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai kewenangan daerah. Pada Bab ini juga memuat cascading kinerja Dispusipda mulai dari tujuan, sasaran, outcome dan output serta indikatornya masing-masing.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat

Tujuan jangka menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan dukungan terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Sasaran jangka menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat dirumuskan dengan memperhatikan tugas dan fungsi, kelompok sasaran yang dilayani, tujuan organisasi, permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Tujuan Renstra urusan perpustakaan mengacu pada sasaran RPD Jawa Barat 2024-2026 yaitu Meningkatkan Akses Pendidikan Masyarakat, dengan indikator yaitu Rata-rata Lama Sekolah. Untuk mencapai tujuan di atas, maka terdapat 2 (dua) sasaran dalam Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat yaitu pertama meningkatkannya pembangunan literasi masyarakat dengan indikator Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Kedua yaitu meningkatkannya kegemaran membaca masyarakat dengan indikator Nilai Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat.

Tujuan Renstra urusan kearsipan mengacu pada sasaran RPD Jawa Barat 2024-2026 yaitu Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan Daerah, dengan indikator yaitu Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan di atas, maka terdapat 2 (dua) sasaran dalam Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat yaitu pertama, Tertibnya Arsip Perangkat Daerah dengan indikator Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik. Kedua Meningkatkan keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat dengan indikator Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat beserta indikator kinerja sebagaimana dalam Tabel 4.1 berikut.





Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispusipda Provinsi Jawa Barat

| No. | Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Target Kinerja Sasaran pada Tahun | | |
|-----|---|----------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1. | Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | 72,74 | 72,84 | 72,94 |
| | | | Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | 73,00 | 73,10 | 73,20 |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Tertibnya Arsip Perangkat Daerah | Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik | 36 Perangkat Daerah | 37 Perangkat Daerah | 38 Perangkat Daerah |
| | | | Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip | 100% | 100% | 100% |

Sumber : Dispusipda,2023

Pencapaian Tujuan dari Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026, dijabarkan melalui rumusan Sasaran Strategis yang disertai dengan Indikator Sasaran yang selanjutnya akan menjadi ukuran pencapaian kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat, untuk 3 (tiga) tahun ke depan yaitu:

1. Sasaran Strategis 1:
Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat.
- Indikator sasaran : Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat diukur berdasarkan 7 (tujuh) aspek yaitu :





- a. Pemerataan Layanan Perpustakaan;
- b. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan;
- c. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan;
- d. Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari ;
- e. Perpustakaan yang dibina sesuai SNP;
- f. Keterlibatan Masyarakat Dalam Sosialisasi Perpustakaan;
- g. Anggota Perpustakaan.

2. Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat

- Indikator sasaran : Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat
Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat diukur berdasarkan 5 (lima) aspek yaitu :
 - a. Frekuensi Membaca (TFM);
 - b. Durasi Membaca (TDM);
 - c. Jumlah Buku Dibaca (TJB);
 - d. Frekuensi Akses Internet (FAI);
 - e. Durasi Akses Internet (DAI).

3. Sasaran Strategis 3:

Tertibnya Arsip Perangkat Daerah

- Indikator sasaran : Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik
Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik diukur berdasarkan 2 (dua) aspek yaitu :
 - a. Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - b. Sumber Daya Kearsipan.

4. Sasaran Strategis 4:

Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

- Indikator sasaran : Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip
Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip diukur berdasarkan 6 (enam) aspek yaitu :
 - a. Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK;
 - b. Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK;
 - c. Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK;
 - d. Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK;
 - e. Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK;
 - f. Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK.





4.2 Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah dan menjadi pedoman bagi ementerian/lembaga pemerintah nonkementerian untuk melakukan pembinaan dan pengawasan. Penyelenggaraan Perpustakaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan penyelenggaraan Kearsipan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.





BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada tugas dan fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat yang disinkronisasikan dengan kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan , dirumuskan pemetaan dari tugas pokok dan fungsi hingga strategi arah kebijakan agar terjamin keselarasan dalam Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Adapun pemetaan tersebut, dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.1
Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan

| Tugas Utama Dispusipda | Fungsi Dispusipda | Tujuan | Sasaran dan IKU Dispusipda |
|--|---|--|--|
| Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan , meliputi : <ul style="list-style-type: none">Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan,Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca, Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan,Pengelolaan Arsip Dinamis,Pengelolaan Arsip Statis yang menjadi kewenangan daerah provinsiMelaksanakan tugas dekonsentrasi dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan | <ul style="list-style-type: none">Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;Penyelenggaraan pengelolaan perpustakaan dan kearsipan yang menjadi kewenangan daerah provinsi;Penyelenggaraan administrasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa BaratPenyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. | <ul style="list-style-type: none">Meningkatnya Akses Pendidikan MasyarakatMeningkatnya kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan daerah | <p>Sasaran :</p> <ul style="list-style-type: none">Meningkatnya pembangunan literasi masyarakatMeningkatnya kegemaran membaca masyarakatTertibnya Arsip Perangkat DaerahMeningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat <p>IKU Dispusipda :</p> <ul style="list-style-type: none">Indeks Pembangunan Literasi MasyarakatNilai Tingkat Kegemaran Membaca MasyarakatNilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori BaikTingkat keberadaan dan keutuhan arsip |

Strategi dan arah kebijakan Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam tiga tahun mendatang, tercantum dalam tabel berikut.





Tabel 5.2
Tujuan Sasaran, Strategi dan Kebijakan

| No | Tujuan | | Sasaran | | Strategi | | Arah Kebijakan | |
|----|--------|---|---------|--|----------|--------------------------------|----------------|--|
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | |
| 1. | 1 | Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | 1.1 | Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat | 1.1.1 | Transformasi Sistem Pendidikan | 1.1.1.1 | Peningkatan Minat Baca dan Literasi Masyarakat |
| | | | 1.2. | Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat | | | | |
| 2. | 2 | Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan daerah | 2.1. | Tertibnya Arsip Perangkat Daerah | 2.1.1 | Pemantapan Reformasi Birokrasi | 2.1.1.1 | Penguatan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang dinamis, (<i>Good Governance and Clean Governance to Dynamic Governance</i>) yang mewujudkan <i>World Class Government</i> |
| | | | 2.2. | Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | 2.2.1 | | | |





BAB VI

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Kebijakan dan strategi arah kebijakan ditindaklanjuti dengan penyusunan program dan kegiatan yang memperhatikan tugas dan fungsi Dispusipda Provinsi Jawa Barat. Program dan Kegiatan disusun berdasarkan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kebijakan ini menjadi salah satu dasar dalam merumuskan program dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026. Adapun rencana program dan kegiatan serta pendanaan Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada tabel berikut.





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

Tabel 6.1.
Sasaran, Program, Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|---|--|------------------------|--|--|------------------|---|----|------------------------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | | | | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | | | 9,03 | | 9,16 | | 9,29 | | 9,29 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat | | | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72,72 | | 72,74 | | 72,84 | | 72,94 | | 72,94 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | Meningkatnya kegemaran membaca | | | Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | | | 73 | | 73,10 | | 73,20 | | 73,20 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan daerah | | | | Indeks Reformasi Birokrasi | Nilai | A | | A | | A | | A | | | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | Tertib arsip Perangkat Daerah | | | Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik | Perangkat Daerah | - | | 36 | | 37 | | 38 | | 38 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | | | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip | Persen | | | 100 | | 100 | | 100 | | 100 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.2.24.0.00.01.0000 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah | | | | | | 54.613.027.209,00 | | 60.074.329.930,00 | | 66.081.762.923,00 | | 66.081.762.923,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI | | | | | | 51.316.016.099,00 | | 56.447.617.708,90 | | 62.092.379.479,79 | | 62.092.379.479,79 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | | | Indeks Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah | Kategori | | | A (84,00) | | A (85,00) | | A (86,00) | | A (86,00) | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Kategori | | | A (83,80) | 350.000.000,00 | A (85,50) | 385.000.000,00 | A (86,00) | 423.500.000,00 | A (86,50) | 423.500.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | | | 4 | 204.491.500,00 | 16 | 224.940.650,00 | 16 | 247.434.715,00 | 48 | 247.434.715,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|---|---------|---|----|------------------------------|-------------------|--------|-------------------|--------|-------------------|---------------|-------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.23.01.1.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | | | | 145.508.500,00 | | 160.059.350,00 | | 176.065.285,00 | | 176.065.285,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase layanan keuangan dengan baik | Persen | | | 100 | 39.995.644.870,00 | 100 | 43.995.209.357,00 | 100 | 121.011.644,00 | 100 | 84.111.865.871,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang | | | 134 | 38.941.613.005,00 | 134 | 42.835.774.305,50 | 134 | 47.119.351.736,05 | 134 | 47.119.351.736,05 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Dokumen | | | 16 | 17.740.500,00 | 16 | 19.514.550,00 | 16 | 21.466.005,00 | 16 | 21.466.005,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Dokumen | | | 3 | 132.259.500,00 | 3 | 145.485.450,00 | 3 | 160.033.995,00 | 3 | 160.033.995,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase ASN yang mendapatkan layanan administrasi kepegawaian | Persen | | | 100 | 40.000.000,00 | 100 | 44.000.000,00 | 100 | 48.400.000,00 | 100 | 132.400.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | Orang | | | 35 | 40.000.000,00 | 40 | 44.000.000,00 | 50 | 48.400.000,00 | 68 | 132.400.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase unit kerja yang terfasilitasi perlengkapan kantor | Persen | | | 100 | 1.562.544.482,00 | 100 | 1.718.798.930,20 | 100 | 1.890.678.823,22 | 100 | 1.890.678.823,22 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | | | 4 | 150.020.200,00 | 4 | 165.022.220,00 | 4 | 181.524.442,00 | 4 | 181.524.442,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | | | 4 | 312.399.680,00 | 4 | 343.639.648,00 | 4 | 378.003.612,80 | 4 | 378.003.612,80 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | | | 0 | 0 | 24 | 310.000.000,00 | 24 | 341.000.000,00 | 24 | 341.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | | | 4 | 36.000.000,00 | 4 | 39.600.000,00 | 4 | 43.560.000,00 | 4 | 43.560.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Dokumen | | | 12 | 0 | 12 | 100.000.000,00 | 12 | 110.000.000,00 | 12 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | | | 12 | 1.235.611.264,00 | 12 | 745.000.000,00 | 12 | 819.500.000,00 | 12 | 819.500.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase pengadaan barang yang tepat waktu | Persen | | | 100 | 2.315.825.235,00 | 100 | 2.547.407.758,50 | 100 | 2.802.148.534,35 | 100 | 2.802.148.534,35 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|--|---------|---|----|------------------------------|------------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.23.01.1.07.0005 | Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | Paket | | | 2 | 31.356.390,00 | 2 | 34.492.029,00 | 2 | 37.941.231,90 | 2 | 37.941.231,90 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | unit | | | 4 | 2.184.368.845,00 | 4 | 2.402.805.729,50 | 4 | 2.643.086.302,45 | 4 | 2.643.086.302,45 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | | | 1 | 100.100.000,00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.100.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase layanan Umum kantor | Persen | | | 100 | 6.558.642.862,00 | 100 | 7.214.507.148,20 | 100 | 7.935.957.863,02 | 100 | 7.935.957.863,02 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | laporan | | | 12 | 1.070.139.289,00 | 12 | 1.177.153.217,90 | 12 | 1.294.868.539,69 | 12 | 1.294.868.539,69 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | laporan | | | 12 | 5.488.503.273,00 | 12 | 6.037.353.600,30 | 12 | 6.641.088.960,33 | 12 | 6.641.088.960,33 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase aset yang tercatat | Persen | | | 100 | 1.397.390.815,00 | 100 | 1.537.129.896,50 | 100 | 1.690.842.886,15 | 100 | 1.690.842.886,15 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | | | 46 | 430.544.000,00 | 46 | 473.598.400,00 | 46 | 520.958.240,00 | 46 | 520.958.240,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | | | 120 | 514.674.815,00 | 130 | 566.142.296,50 | 140 | 622.756.526,15 | 140 | 622.756.526,15 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.01.1.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | | | 2 | 452.172.000,00 | 2 | 497.389.200,00 | 3 | 547.128.120,00 | 3 | 547.128.120,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02 | PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN | | | | | | 1.876.908.703,00 | | 2.064.599.573,30 | | 2.271.059.530,63 | | 2.271.059.530,63 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | | | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan | Poin | | | 1,4901 | | 1,4902 | | 1,4903 | | 1,4903 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan | Poin | | | 0,0027 | | 0,0028 | | 0,0029 | | 0,0029 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | | | Tingkat Kunjungan Pemustaka | Poin | | | 0,4281 | | 0,4282 | | 0,4283 | | 0,4283 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | | | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP | Poin | | | 2,1990 | | 2,1991 | | 2,1992 | | 2,1992 | | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | Meningkatnya Koleksi Perpustakaan | Persen | | | 100 | 1.576.538.950,00 | 100 | 1.734.192.845,00 | 100 | 1.907.612.129,50 | 100 | 1.907.612.129,50 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|--|--------------|---|----|------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | Realisasi | Rp | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.23.02.1.01.0002 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah perpustakaan yang dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya | Perpustakaan | | | 80 | 374.846.200,00 | 80 | 412.330.820,00 | 80 | 453.563.902,00 | 80 | 453.563.902,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01.0003 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang dikembangkan | Eksemplar | | | 100 | 6.612.000,00 | 120 | 7.273.200,00 | 140 | 8.000.520,00 | 140 | 8.000.520,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan pendidikan menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Jumlah perpustakaan pada Satuan pendidikan menengah atas dan Pendidikan khusus yang dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | | | 200 | 150.000.000,00 | 200 | 165.000.000,00 | 200 | 181.500.000,00 | 200 | 181.500.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01.0006 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | orang | | | 50 | 85.000.000,00 | 50 | 93.500.000,00 | 50 | 102.850.000,00 | 50 | 102.850.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01.0008 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | Jumlah Perpustakaan Deposit yang dikembangkan | Perpustakaan | | | 1 | 52.354.000,00 | 1 | 57.589.400,00 | 1 | 63.348.340,00 | 1 | 63.348.340,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01.0009 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk mewujudkan keberagaman koleksi perpustakaan | Eksemplar | | | 4940 | 710.832.750,00 | 4940 | 781.916.025,00 | 4940 | 860.107.627,50 | 4940 | 860.107.627,50 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.01.0015 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK | Perpustakaan | | | 3 | 196.894.000,00 | 3 | 216.583.400,00 | 3 | 238.241.740,00 | 3 | 238.241.740,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.02 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | Persentase Peningkatan Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca (100 persen) | Persen | | | 100 | 300.369.753,00 | 100 | 330.406.728,30 | 100 | 363.447.401,13 | 100 | 363.447.401,13 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.02.0001 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Jumlah Lokus pembudayaan kegemaran membaca dan literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Lokus | | | 27 | 150.369.753,00 | 27 | 165.406.728,30 | 27 | 181.947.401,13 | 81 | 181.947.401,13 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.02.0004 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang dikembangkan | perpustakaan | | | 4 | 100.000.000,00 | 4 | 110.000.000,00 | 4 | 121.000.000,00 | 12 | w | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.02.1.02.0006 | Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi yang terpilih | orang | | | 54 | 50.000.000,00 | 54 | 55.000.000,00 | 54 | 60.500.000,00 | 162 | 60.500.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03 | PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO | Persentase peningkatan koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan | Persen | | | 24 | 263.307.250,00 | 32 | 289.637.975,00 | 40 | 318.601.772,50 | 40 | 318.601.772,50 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.01 | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | Persentase peningkatan KCKR Daerah yang dihimpun dan dilestarikan | Persen | | | 0,6 | 141.893.000,00 | 0,6 | 156.082.300,00 | 0,6 | 171.690.530,00 | 0,6 | 171.690.530,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|---|---|-----------|---|----|------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.23.03.1.01.0001 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah buku koleksi KCKR yang tersimpan di layanan Perpustakaan Deposit | Judul | | | 4250 | 115.000.000,00 | 4275 | 126.500.000,00 | 4300 | 139.150.000,00 | 4300 | 139.150.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.01.0002 | Pemberian penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang aktif dalam melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Penerima Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang aktif dalam melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Penerbit | | | 3 | 26.893.000,00 | 3 | 29.582.300,00 | 3 | 32.540.530,00 | 9 | 32.540.530,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.02 | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | Persentase peningkatan Judul yang tercantum pada Bibliografi Daerah | Persen | | | 3 | 30.659.000,00 | 3 | 33.724.900,00 | 3 | 37.097.390,00 | 3 | 37.097.390,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.02.0001 | Penerbitan Katalog Induk Daerah | Jumlah dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan | Entry | | | 3400 | 19.000.000,00 | 3500 | 20.900.000,00 | 3600 | 22.990.000,00 | 3600 | 22.990.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.02.0002 | Penerbitan Bibliografi Daerah | Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan | Judul | | | 3900 | 11.659.000,00 | 4000 | 12.824.900,00 | 4100 | 14.107.390,00 | 4100 | 14.107.390,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.03 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | Persentase peningkatan naskah kuno yang dialih median | Persen | | | 24 | 78.053.000,00 | 32 | 85.858.300,00 | 40 | 94.444.130,00 | 40 | 94.444.130,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.03.0001 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno | orang | | | 25 | 14.400.000,00 | 25 | 15.840.000,00 | 25 | 17.424.000,00 | 25 | 17.424.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.03.0002 | Pengembangan, pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah Hasil pengembangan, pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Naskah | | | 2 | 63.653.000,00 | 2 | 70.018.300,00 | 2 | 77.020.130,00 | 2 | 77.020.130,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.04 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | Persentase peningkatan koleksi Etnis Budaya Nusantara | Persen | | | 20 | 12.702.250,00 | 20 | 13.972.475,00 | 20 | 15.369.722,50 | 20 | 15.369.722,50 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.04.0001 | Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eksemplar | | | 150 | 8.613.000,00 | 175 | 9.474.300,00 | 200 | 10.421.730,00 | 200 | 10.421.730,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.23.03.1.04.0002 | Pengolahan dan Penyiangkan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan Penyiangkan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eksemplar | | | 150 | 4.089.250,00 | 175 | 4.498.175,00 | 200 | 4.947.992,50 | 200 | 4.947.992,50 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02 | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP | Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Persen | | | 91 | 571.425.507,00 | 92 | 628.568.057,70 | 93 | 691.424.863,47 | 93 | 691.424.863,47 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-------------------|--|---|--------------------------------------|---|----|------------------------------|----------------|--------|------------------|--------|------------------|---------------|------------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.24.02.1.01 | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | Persentase peningkatan Penciptaan, Penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis | Persen | | | 100 | 446.271.707,00 | 100 | 490.898.877,70 | 100 | 539.988.765,47 | 100 | 539.988.765,47 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Audit Kearsipan Internal | Laporan | | | 38 | 96.974.800,00 | 38 | 106.672.280,00 | 38 | 117.339.508,00 | 38 | 117.339.508,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.01.0004 | Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Arsip yang Dimusnahkan | Berita Acara dan Daftar Arsip Musnah | | | 6 | 138.507.920,00 | 8 | 152.358.712,00 | 12 | 167.594.583,20 | 12 | 167.594.583,20 | | |
| | | 2.24.02.1.01.0005 | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi | Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan | Lembar | | | 3050 | 18.184.320,00 | 3050 | 20.002.752,00 | 3050 | 22.003.027,20 | 3050 | 22.003.027,20 | | |
| | | 2.24.02.1.01.0006 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | Jumlah Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif | Daftar | | | 96 | 192.604.667,00 | 111 | 211.865.133,70 | 126 | 233.051.647,07 | 126 | 233.051.647,07 | | |
| | | 2.24.02.1.02 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | Persentase Arsip Statis yang di kelola sesuai standar | Persen | | | 100 | - | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 220.000.000,00 | 100 | 220.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.02.01 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada NKRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI | Arsip | | | 1 | - | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.02.02 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses | Arsip | | | 3 | - | 3 | 100.000.000,00 | 3 | 110.000.000,00 | 10 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.03 | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Persentase permohonan arsip yang dilayani sesuai standar | Persen | | | 100 | 125.153.800,00 | 100 | 137.669.180,00 | 100 | 151.436.098,00 | 100 | 151.436.098,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.03.01 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Pengguna | | | 1500 | 62.698.000,00 | 1500 | 68.967.800,00 | 1500 | 75.864.580,00 | | 75.864.580,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.03.02 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | laporan | | | 18 | 62.455.800,00 | 18 | 68.701.380,00 | 18 | 75.571.518,00 | | 75.571.518,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.02.1.03.03 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Arsip | | | 1 | - | 1 | 50.000.000,00 | 1 | 55.000.000,00 | | 55.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP | Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis | Persen | | | 70 | 585.369.650 | 71 | 2.200.000.000,00 | 72 | 2.420.000.000,00 | 73 | 2.420.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|---|--|--------|---|----|------------------------------|----------------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.24.03.1.02 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | Persentase arsip yang diselamatkan akibat bencana | Persen | | | 100 | 200.000.000 | 100 | 320.000.000 | 100 | 352.000.000 | 100 | 352.000.000 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.02.01 | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | | | 600 | 200.000.000,00 | 600 | 220.000.000,00 | 600 | 242.000.000,00 | 600 | 242.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.02.02 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | | | 500 | - | 500 | 100.000.000,00 | 500 | 110.000.000,00 | 500 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.03 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | Persentase arsip yang diselamatkan akibat penggabungan, dan atau di bubarkan dan pemekaran daerah kabupaten/kota | Persen | | | 100 | 200.000.000,00 | 100 | 420.000.000,00 | 100 | 462.000.000,00 | 100 | 462.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.03.01 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabun gan Perangkat Daerah Provinsi | Daftar | | | 2 | - | 2 | 100.000.000,00 | 2 | 110.000.000,00 | 2 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.03.02 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | Arsip | | | 2 | 200.000.000,00 | 2 | 220.000.000,00 | 2 | 242.000.000,00 | 2 | 242.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.03.03 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Arsip | | | 1 | - | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.04 | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh Lembaga Kearsipan Daerah | Persentase arsip statis yang di autentikasi dan hasil alih media yang sesuai standar | Persen | | | 100 | 185.369.650,00 | 100 | 320.000.000,00 | 100 | 352.000.000,00 | 100 | 352.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.04.01 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan ditetapkan sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip | | | 3050 | 0,00 | 3050 | 100.000.000,00 | 3050 | 110.000.000,00 | 3050 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.04.02 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip | | | 3050 | 185.369.650,00 | 3050 | 203.906.615,00 | 3050 | 224.297.276,50 | 3050 | 224.297.276,50 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.05 | Pencarian Arsip Statis Provinsi yang dinyatakan Hilang | Persentase pencarian arsip statis yang dinyatakan hilang | Persen | | | 100 | 0,00 | 100 | 300.000.000,00 | 100 | 330.000.000,00 | 100 | 330.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.05.01 | Penilaian dan Penetapan Hasil AlihMedia yang dinyatakan hilang | Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan | Arsip | | | 1 | 0,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |





Rencana Strategis Perubahan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| Tujuan | Sasaran | Kode Rekening | Program, Kegiatan, & Sub Kegiatan | Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (output) dan Sub Kegiatan | Satuan | Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan (2022) | | Target Kinerja dan Pendanaan | | | | | | Kondisi Akhir | | Unit Kerja Penanggung Jawab | Lokasi |
|--------|---------|-----------------|--|--|--------|---|----|------------------------------|------|--------|----------------|--------|----------------|---------------|----------------|--------------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | | | | |
| | | | | | | Realisasi | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 2.24.03.1.05.02 | Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan hilang | Arsip | | | 1 | 0,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |
| | | 2.24.03.1.05.03 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) | Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang dilakukan Penetapan dan Penumuman | Arsip | | | 1 | 0,00 | 1 | 100.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | 1 | 110.000.000,00 | Dispusipda Provinsi Jawa Barat | Provinsi Jawa Barat |

Sumber: Dispusipda, 2023





BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan Indikator kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan sehingga target pencapaian menjadi jelas dan terukur. Indikator Kinerja Utama (IKU) dirumuskan sebagai *critical success factor* terhadap pencapaian sasaran kinerja pemerintah daerah pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 sehingga terbangun korelasi yang jelas antara kinerja pemerintah daerah dengan kinerja perangkat daerah. Adapun kinerja Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 disajikan pada tabel 7.1 berikut.

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama Dispusipda Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Satuan | Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke- | | | Kondisi Akhir pada Akhir Periode Renstra |
|-----|---|--|--|------------------|---------------------------------------|-------|-------|--|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Indeks | 72,74 | 72,84 | 72,94 | 72,94 |
| | | Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | Nilai | 73 | 73,10 | 73,20 | 73,20 |
| 2. | Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata Kelola pemerintahan daerah | Tertibnya Arsip Perangkat Daerah | Nilai Laporan Audit Kearsipan Internal Kategori Baik | Perangkat Daerah | 36 | 37 | 38 | 38 |
| | | Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Dispusipda, 2023

Sedangkan, indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan kinerja Program selama tiga tahun mendatang dapat dilihat pada Tabel berikut:





Tabel 7.2
Indikator Program Dispusipda Provinsi Jawa Barat 2024-2026

| No. | Program | Indikator Program | Satuan | Target Kinerja Program pada Tahun ke- | | | Kondisi Akhir pada Akhir Periode Renstra |
|-----|--|--|----------|---------------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 | |
| 1. | Program Pembinaan Perpustakaan | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan | Poin | 1,4901 | 1,4902 | 1,4903 | 1,4903 |
| | | Ketercukupan Tenaga Perpustakaan | Poin | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | 0,0029 |
| | | Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari | Persen | 0,4281 | 0,4282 | 0,4283 | 0,4283 |
| | | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (Standar Nasional Perpustakaan) | Poin | 2,1990 | 2,1991 | 2,1992 | 2,1992 |
| 2. | Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang dilestarikan | Persen | 25 | 27 | 29 | 29 |
| 3. | Program Pengelolaan Arsip | Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional | Persen | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4. | Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | Persentase Akuisisi dan Pelestarian Arsip Statis | Persen | 70 | 71 | 72 | 73 |
| 5. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah | Kategori | A (84.00) | A (85.00) | A (86.00) | A (86.00) |





BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 merupakan dokumen yang disusun oleh Dispusipda Provinsi Jawa Barat dalam merencanakan pelaksanaan tugas dan fungsi pada masa transisi jabatan kepala daerah. Dokumen ini memuat perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, serta pendanaannya dalam periode 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. Selain itu, Renstra Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat juga memiliki makna yang strategis dalam menjaga kesinambungan proses perencanaan pembangunan daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia, sumber pendanaan, serta komitmen semua unsur. Hal yang tidak kalah penting untuk keberhasilan pelaksanaan Renstra yaitu evaluasi untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan dari Renstra ini yang akan dilaksanakan setiap tahunnya, serta melakukan sosialisasi dokumen Renstra Perubahan Dispusipda Provinsi Jawa Barat kepada seluruh pegawai, mitra, serta pemangku kepentingan pembangunan Provinsi Jawa Barat.

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 merupakan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023. Bappeda Provinsi Jawa Barat dalam menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renstra mengikuti ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah,

Rencana Strategis Perubahan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 ini diharapkan menjadi pedoman atau panduan dalam pelaksanaan kebijakan dan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dispusipda Provinsi Jawa Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya hingga tahun 2026. Disamping itu juga perlu adanya komitmen yang kuat dalam menjamin kelanjutan dan konsistensi program pembangunan dengan menyesuaikan dinamika perubahan organisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan isu strategis terkini.



Cascading Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026

| PENJABARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | RENCANA STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | | | Kode | | | | | Nomenklatur Program Provinsi (Permendagri 90) | | | | | | Indikator Kinerja | SATUAN | Target | | | Penanggung Jawab Eselon | Catatan | Anggaran | | |
|--|------------------------|--------|--------|------|------|--|--|--|--------|--------|-------|-------|-------|--------------|---------|----------|--------------|--------------------------|---|--------------|--|---|--------|--------|-------------------|--|--|----------------|------------------|-------------------------|------------------|----------|--|--|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | | | Sasaran | Indikator | RUMUS PERHITUNGAN | Satuan | Target | | | Unsan | Bidang Unsan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Program Perangkat Daerah | Kegiatan | Sub Kegiatan | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | | | 2025 | 2026 | | | | | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | | | | |
| Meningkatnya Akses Pendidikan Masyarakat | Rata-rata Lama Sekolah | Tahun | 9,03 | 9,16 | 9,29 | Meningkatnya pembangunan literasi masyarakat | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | Semua unsur pembangunan literasi masyarakat dibagi semua aspek masyarakat (7 aspek) dikali (X)100% | Indeks | 72,93 | 73,03 | 73,13 | 2 | 23 | 02 | | | 1 | Pembinaan Perpustakaan | | | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan | Poin | 1,4901 | 1,4902 | 1,4903 | Kepala Bidang Perpustakaan Deposit dan Pengembangan Bahan Perpustakaan (PDPBP) | | 1.876.908.703,00 | 2.064.599.573,30 | 2.271.059.530,63 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | | | | | | Ketercukupan tenaga perpustakaan | Poin | 0,0027 | 0,0028 | 0,0029 | Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca (BPBGM) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | | | | | | Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari | Persen | 0,4281 | 0,4282 | 0,4283 | Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan (PPK) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | | | | | | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP | Poin | 2,1990 | 2,1991 | 2,1992 | Kepala Bidang Bina Perpustakaan dan Budaya Gemar Membaca (BPBGM) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | | 1 | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi | | | Meningkatnya Koleksi Perpustakaan | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang BPBGM | | 1.576.538.950,00 | 1.734.192.845,00 | 1.907.612.129,50 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0002 | | | 1 | Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi | Perpustakaan | 80 | 80 | 80 | Kepala Bidang PPK | | 374.846.200,00 | 412.330.820,00 | 453.563.902,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0003 | | | 2 | Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eksemplar | 44 | 50 | 54 | Kepala Bidang PDPBP | | 6.612.000,00 | 7.273.200,00 | 8.000.520,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0004 | | | 3 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan | Perpustakaan | 200 | 200 | 200 | Kepala Bidang BPBGM | | 150.000.000,00 | 165.000.000,00 | 181.500.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0006 | | | 4 | Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi | orang | 50 | 50 | 50 | Kepala Bidang BPBGM | | 85.000.000,00 | 93.500.000,00 | 102.850.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0008 | | | 5 | Pengembangan Perpustakaan Deposit | Perpustakaan | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang PDPBP | | 52.354.000,00 | 57.589.400,00 | 63.348.340,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0009 | | | 6 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka | Eksemplar | 4678 | 4940 | 4940 | Kepala Bidang PDPBP | | 710.832.750,00 | 1.777.081.875,00 | 2.666.622.813,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.01 | 0015 | | | 7 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik | Perpustakaan | 3 | 3 | 3 | Kepala Bidang PDPBP | | 196.894.000,00 | 1.405.000.000,00 | 1.545.500.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.02 | | 2 | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi | | | Persentase Peningkatan Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca (100 persen) | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang BPBGM | | 300.369.753,00 | 330.406.728,30 | 363.447.401,10 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0001 | | | 1 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat | Lokus | 27 | 27 | 27 | Kepala Bidang BPBGM | | 150.369.753,00 | 165.406.728,30 | 181.947.401,10 | | | | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>

| PENJABARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | RENCANA STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | | Kode | | | | | Nomenklatur Program Provinsi (Permendagri 90) | | | | | | Indikator Kinerja | SATUAN | Target | | | Penanggung Jawab Eselon | Catatan | Anggaran | | |
|--|------------------|--------|--------|------|------|--|--|---|--------|--------|------|------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|--|--------------|--|---|---|-------------------|--------|---------------------|------|---------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | | | Sasaran | Indikator | RUMUS PERHITUNGAN | Satuan | Target | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Program Perangkat Daerah | Kegiatan | Sub Kegiatan | 2024 | 2025 | 2026 | | | Kepala Bidang PDPBP | 2024 | 2025 | | | 2026 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0004 | | | | 2 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial | Jumlah Pembinaan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang dikembangkan | Perpustakaan | 4 | 4 | 4 | Kepala Bidang BPBGM | | 100.000.000,0 | 110.000.000,0 | 121.000.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 02 | 1.02 | 0006 | | | | 3 | Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi | Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi yang terpilih | orang | 54 | 54 | 54 | Kepala Bidang BPBGM | | 50.000.000,0 | 55.000.000,0 | 60.500.000,0 | |
| | | | | | | Meningkatnya kegemaran membaca masyarakat | Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat | TGM = Jumlah Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat Kab./Kota/Jumlah Kabupaten Kota | Nilai | 71 | 72 | 73 | 2 | 23 | 03 | 1.01 | | 2 | Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno | | | | Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Yang dilestarikan | Persen | 24 | 32 | 40 | Kepala Bidang PDPBP | | 263.307.250,0 | 289.637.975,0 | 318.601.772,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.01 | | | | 1 | Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi | | Persentase peningkatan KCKR Daerah yang dihimpun dan dilestarikan | Persen | 2,0 | 2,0 | 2,0 | Kepala Bidang PDPBP | | 141.893.000,0 | 156.082.300,0 | 171.690.530,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0001 | | | | 1 | Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah buku koleksi KCKR yang tersimpan di layanan Perpustakaan Deposit | Judul | 2500 | 2550 | 2600 | Kepala Bidang PDPBP | | 115.000.000,0 | 126.500.000,0 | 139.150.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.01 | 0002 | | | | 2 | Pemberian penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang aktif dalam melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Jumlah Penerima Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang aktif dalam melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam | Penerbit | 5 | 6 | 7 | Kepala Bidang PDPBP | | 26.893.000,0 | 29.582.300,0 | 32.540.530,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.02 | | | | 2 | Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | | Persentase peningkatan Judul yang tercantum pada Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah | Persen | 3 | 3 | 3 | Kepala Bidang PDPBP | | 30.659.000,0 | 33.724.900,0 | 37.097.390,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0001 | | | | 1 | Penerbitan Katalog Induk Daerah | Jumlah dokumen KID dan Literatur Sekunder lainnya yang diterbitkan | Entry | 3400 | 3500 | 3600 | Kepala Bidang PDPBP | | 19.000.000,0 | 20.900.000,0 | 22.990.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.02 | 0002 | | | | 2 | Penerbitan Bibliografi Daerah | Jumlah Bibliografi Daerah yang diterbitkan | Judul | 2500 | 2550 | 2600 | Kepala Bidang PDPBP | | 11.659.000,0 | 12.824.900,0 | 14.107.390,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.03 | | | | 3 | Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi | | Persentase peningkatan naskah kuno yang dialih mediakan | Persen | 24 | 32 | 40 | Kepala Bidang PDPBP | | 78.053.000,0 | 85.858.300,0 | 94.444.130,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.03 | 0001 | | | | 1 | Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno | Jumlah masyarakat yang berperan dalam Pelestarian Naskah Kuno dan Pendaftaran Naskah Kuno | orang | 25 | 25 | 25 | Kepala Bidang PDPBP | | 14.400.000,0 | 15.840.000,0 | 17.424.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.03 | 0002 | | | | 2 | Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Jumlah hasil pengembangan pengolahan dan pengalihmediaan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan | Naskah Kuno | 2 | 4 | 4 | Kepala Bidang PDPBP | | 63.653.000,0 | 108.210.000,0 | 113.620.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.04 | | | | 4 | Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi | | Persentase peningkatan koleksi Etnis Budaya Nusantara | Persen | 20 | 20 | 20 | Kepala Bidang PDPBP | | 12.702.250,0 | 13.972.475,0 | 15.369.722,5 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.04 | 0001 | | | | 1 | Seleksi dan pengadaan koleksi budaya etnis nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diseleksi dan dilakukan pengadaan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eksemplar | 130 | 150 | 170 | Kepala Bidang PDPBP | | 8.613.000,0 | 9.474.300,0 | 10.421.730,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 03 | 1.04 | 0002 | | | | 2 | Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara | Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang diolah dan dilakukan Penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi | Eksemplar | 130 | 150 | 170 | Kepala Bidang PDPBP | | 4.089.250,0 | 4.498.175,0 | 4.947.992,5 | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>

| PENJABARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | RENCANA STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | | Kode | | | | | Nomenklatur Program Provinsi (Permendagri 90) | | | | | | | Indikator Kinerja | SATUAN | Target | | | Penanggung Jawab Eselon | Catatan | Anggaran | | |
|---|----------------------------|--------|--------|------|------|--|---|--|------------------|--------|------|------|--------|---------------|---------|----------|--------------|---|------------------------------------|----------|--|--|------------------------------------|---|-------------------|--------|-------------------|-------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|----------------|--|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | | | Sasaran | Indikator | RUMUS PERHITUNGAN | Satuan | Target | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Program Perangkat Daerah | | Kegiatan | | Sub Kegiatan | | 2024 | | | 2025 | 2026 | 2024 | | | 2025 | 2026 | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah | Indeks Reformasi Birokrasi | Poin | A | A | A | Tertibnya Arsip Perangkat Daerah | Nilai Laporan Audit Kearsipan Kategori Baik | Jumlah nilai yang diberikan atas pengelolaan arsip dinamis berdasarkan objek pengawasan dan atau aspek pengawasan dengan kategori penilaian sebagai berikut : 1. Nilai > 90-100 kategori AA (sangat memuaskan) 2. Nilai > 80-90 kategori A (memuaskan) 3. Nilai 70-80 kategori BB (sangat baik), 4. Nilai > 60-70 kategori B (baik), 5. Nilai > 50-60 kategori CC (cukup), 6. Nilai > 30-50 kategori C (kurang), 7. Nilai 0-30 kategori D (sangat kurang) | Perangkat Daerah | 36 | 38 | 38 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Meningkatnya keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip | T = (m + b + g + a + c + i)/6 T = Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban m = Tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK b = Tingkat kesesuaian kegiatan perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK g = Tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan dan pemekaran daerah Kabupaten/Kota dengan NSPK a = Tingkat kesesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK c = Tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK i = Tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup dengan NSPK | Persen | 100 | 100 | 100 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 02 | | | 3 | Pengelolaan Arsip | | | | | Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan | | 571.425.507,00 | 628.568.057,70 | 691.424.863,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 02 | 1.01 | | 1 | Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi | | | | | Persentase peningkatan Penciptaan, Penggunaan, pemeliharaan dan penyusutan Arsip Dinamis | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang PAD | | 446.271.707,00 | 490.898.877,70 | 539.988.765,47 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0003 | | | 1 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Provinsi | Jumlah Laporan Audit Kearsipan Internal | Laporan | 38 | 38 | 38 | Kepala Bidang PAD | | 96.974.800,00 | 106.672.280,00 | 117.339.508,00 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0004 | | | | 2 | Penyusutan Arsip Dinamis | Jumlah Arsip yang Dimusnahkan | Berita Acara dan Daftar Arsip Musnah | 6 | 8 | 12 | Kepala Bidang PAD | | 138.507.920,00 | 152.358.712,00 | 167.594.583,20 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0005 | | | | 3 | Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi | Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan | Lembar | 3050 | 3050 | 3050 | Kepala Bidang PAD | | 18.184.320,00 | 20.002.752,00 | 22.003.027,20 | | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>

| PENJABARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | RENCANA STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | | | Kode | | | | | Nomenklatur Program Provinsi (Permendagri 90) | | | | | | | Indikator Kinerja | SATUAN | Target | | | Penanggung Jawab Eselon | Catatan | Anggaran | | |
|--|------------------|--------|--------|------|------|--|-----------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------|---|--------------|---|--|----------|------|------|-------------------|--|----------------|----------------|----------------|-------------------------|---------|----------|--|--|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | | | Sasaran | Indikator | RUMUS PERHITUNGAN | Satuan | Target | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Program Perangkat Daerah | Kegiatan | Sub Kegiatan | 2024 | 2025 | 2026 | 2024 | 2025 | | | 2026 | | | | | | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 02 | 1.01 | 0006 | | | 4 | Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis | Jumlah Daftar Arsip Aktif dan Daftar Arsip Inaktif | Daftar | 96 | 111 | 126 | Kepala Bidang PAD | | 192.604.667,00 | 211.865.133,70 | 233.051.647,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.02 | | | | 2 | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi | Persentase Arsip Statis yang dikelola sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis | | | 400.000.000,00 | 440.000.000,00 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.02 | 0001 | | | 1 | Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada NKRI | Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan disampaikan kepada ANRI | Arsip | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis | 0,00 | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.02 | 0003 | | | 2 | Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan | Jumlah orang yang diwawancara | orang | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.02 | 0004 | | | 3 | Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip | Jumlah penerbitan naskah sumber arsip | Arsip | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis | 0,00 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.02 | 0005 | | | 4 | Akuisisi Arsip Statis | Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi | Arsip | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis | 0,00 | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.03 | | | | 3 | Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi | Persentase permohonan arsip yang dilayani sesuai standar | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan | 125.153.800,00 | 137.669.180,00 | 151.436.098,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.03 | 0001 | | | 1 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN | Pengguna | 1500 | 1500 | 1500 | Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan | 62.698.000,00 | 68.967.800,00 | 75.864.580,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.03 | 0002 | | | 2 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | Jumlah laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi | laporan | 18 | 18 | 18 | Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan | 62.455.800,00 | 68.701.380,00 | 75.571.518,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 1.03 | 0003 | | | 3 | Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Arsip | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan | | 50.000.000,00 | 55.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.04 | | | | 4 | Pembinaan kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota | Persentase peningkatan Pembinaan kearsipan | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.04 | 0001 | | | 1 | Pelaksanaan bimbingan teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan | Jumlah Laporan Bimbingan Teknis terkait kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi, badan usaha milik daerah provinsi dan lembaga kearsipan kabupaten/kota yang dilaksanakan | laporan | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.04 | 0002 | | | 2 | Pelaksanaan Pembinaan kearsipan terhadap Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan | Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Provinsi, dan Organisasi Politik Tingkat Provinsi, Perusahaan Swasta, dan Tokoh Masyarakat Tingkat Provinsi yang dilakukan pembinaan | Lembaga | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.06 | | | | 5 | Pengawasan kearsipan di provinsi | Persentase peningkatan Pengawasan kearsipan | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.06 | 0001 | | | 1 | Pengawasan Kearsipan terhadap perangkat daerah provinsi | Jumlah perangkat daerah provinsi yang dilakukan pengawasan | instansi | 38 | 38 | 38 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | | | | | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>

| PENJABARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | RENCANA STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | Kode | | | | | Nomenklatur Program Provinsi (Permendagri 90) | | | | | | Indikator Kinerja | SATUAN | Target | | | Penanggung Jawab Eselon | Catatan | Anggaran | | |
|--|------------------|--------|--------|------|------|--|-----------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|---------------|---------|----------|---|-------------------------------------|----------|---|---|---|-------------------|--------|--------|------|---|-------------------------|----------------|------------------|------------------|--|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | | | Sasaran | Indikator | RUMUS PERHITUNGAN | Satuan | Target | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Program Perangkat Daerah | Kegiatan | Sub Kegiatan | 2024 | 2025 | | | 2026 | 2024 | 2025 | | | 2026 | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.06 | 0002 | | | | 2 | Pengawasan Kearsipan terhadap badan usaha milik daerah di provinsi | Jumlah badan usaha milik daerah provinsi yang dilakukan pengawasan | Lembaga | 10 | 10 | 10 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis | | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 24 | 02 | 3.06 | 0003 | | | | 3 | Pengawasan Kearsipan terhadap pemerintah daerah kabupaten/kota | Jumlah pemerintah daerah kabupaten/kota yang dilakukan pengawasan | Lembaga | 27 | 27 | 27 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis dan Statis | | | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | | 24 | 03 | | | 4 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip | | | | Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional) Pasal 40 dan 59 UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Dinamis, Kepala Bidang Pengelolaan Arsip Statis, Kepala Bidang Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan | | 585.369.650,00 | 2.200.000.000,00 | 2.420.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.02 | | | | 1 | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi | | | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang PAS | | 200.000.000,00 | 320.000.000,00 | 352.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.02 | 0001 | | | | 1 | Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | 600 | 600 | 600 | Kepala Bidang PAS | | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.02 | 0002 | | | | 2 | Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana | Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana | Arsip | 500 | 500 | 500 | Kepala Bidang PAS | | | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.03 | | | | 2 | Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota | | | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang PAS | | 200.000.000,00 | 420.000.000,00 | 462.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0001 | | | | 1 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan pendataan, penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi | Daftar | 2 | 2 | 2 | Kepala Bidang PAS | | 0,00 | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0002 | | | | 2 | Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi | Arsip | 2 | 2 | 2 | Kepala Bidang PAS | | 200.000.000,00 | 220.000.000,00 | 242.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.03 | 0003 | | | | 3 | Pendampingan Penyelamatan Arsip Bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Pendampingan Penyelamatan bagi Pemekaran Lintas Kabupaten/Kota | Arsip | 1 | 1 | 1 | Kepala Bidang PAS | | 0,00 | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.04 | | | | 3 | Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang dikelola oleh | | | Persen | 100 | 100 | 100 | Kepala Bidang PAS | | 185.369.650,00 | 320.000.000,00 | 352.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.04 | 0001 | | | | 1 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan ditetapkan sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip | 3050 | 3050 | 3050 | Kepala Bidang PAS | | 0,00 | 100.000.000,00 | 110.000.000,00 | |
| | | | | | | | | | | | | 2 | 24 | 03 | 1.04 | 0001 | | | | 2 | Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Jumlah Daftar arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media sesuai persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip | Arsip | 3050 | 3050 | 3050 | Kepala Bidang PAS | | 185.369.650,00 | 203.906.615,00 | 224.297.276,50 | |



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>




<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>

| PENJABARAN RPD PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | RENCANA STRATEGIS DISPUSIPDA PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024-2026 | | | | | | | | Kode | | | | | Nomenklatur Program Provinsi (Permendagri 90) | | | | | | | Indikator Kinerja | SATUAN | Target | | | Penanggung Jawab Eselon | Catatan | Anggaran | | | |
|--|------------------|--------|--------|------|------|--|-----------|-------------------|--------|--------|------|------|--------|---------------|---------|----------|--------------|--------------------------|---|--------------|------|------|------|--|---|---|--|---------|-----|-----|-------------------------|------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tujuan | Indikator Tujuan | Satuan | Target | | | Sasaran | Indikator | RUMUS PERHITUNGAN | Satuan | Target | | | Urusan | Bidang Urusan | Program | Kegiatan | Sub Kegiatan | Program Perangkat Daerah | Kegiatan | Sub Kegiatan | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | 2024 | 2025 | 2026 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,07 | 0006 | | | | | | | | 2 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | Unit | 51 | 50 | 4 | Sekretaris | | 2.161.219.542,0 | 460.000.000,0 | 506.000.000,0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,07 | 0009 | | | | | | | | 3 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | Unit | 3 | 1 | 1 | Sekretaris | | 251.437.500,0 | 100.000.000,0 | |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,08 | | | | | | | | | 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Unit Kerja Yang Terlayani Jasa Pelayanan Umum Kantor | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretaris | | 6.558.642.862,0 | 7.214.507.148,2 | 7.935.957.863,0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,08 | 0002 | | | | | | | | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 12 | Sekretaris | | 1.070.139.289,0 | 1.177.153.217,9 | 1.294.868.539,6 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,08 | 0004 | | | | | | | | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 12 | 12 | 12 | Sekretaris | | 5.488.503.273,0 | 6.037.353.600,3 | 6.641.088.960,3 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,09 | | | | | | | | | 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Sarana dan Prasarana Dalam Kondisi Baik | Persen | 100 | 100 | 100 | Sekretaris | | 950.960.300,0 | 1.046.056.330,0 | 1.150.661.963,0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,09 | 0002 | | | | | | | | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | unit | 47 | 47 | 47 | Sekretaris | | 264.794.000,0 | 300.000.000,0 | 330.000.000,0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,09 | 0006 | | | | | | | | 2 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | unit | 101 | 130 | 140 | Sekretaris | | 181.726.300,0 | 323.000.000,0 | 355.300.000,0 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 | 23 | 01 | 1,09 | 0010 | | | | | | | | 3 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | unit | 2 | 2 | 2 | Sekretaris | | 504.440.000,0 | 581.130.619,0 | 639.243.680,9 |

Bandung, 3 Mei 2024

KEPALA DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,



Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT,

Dra. Hj. I GUSTI AGUNG KIM FAJAR WIYATI OKA, M.Si
Pembina Utama Muda



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/77852C6B0B>